

**KEBIJAKAN PEMERINTAH INDIA DALAM MELINDUNGI HAK
ANAK YATIM PIATU SELAMA PANDEMI COVID-19
TAHUN 2020-2022**

SKRIPSI



OLEH:

EMAH YUSIANTI

151190039

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
YOGYAKARTA**

2023

**KEBIJAKAN PEMERINTAH INDIA DALAM MELINDUNGI HAK
ANAK YATIM PIATU SELAMA PANDEMI COVID-19
TAHUN 2020-2022
SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana dalam Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dengan Spesialisasi Ilmu Hubungan Internasional**



OLEH:

EMAH YUSIANTI

151190039

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
YOGYAKARTA**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA MAHASISWA : EMAH YUSIANTI
No. MAHASISWA : 151190039
JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN PEMERINTAH INDIA DALAM
MELINDUNGI HAK ANAK YATIM PIATU
SELAMA PANDEMI COVID-19 TAHUN
2020-2022

Skripsi ini telah Disetujui untuk Diujikan
di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta

Hari : Jum'at
Tanggal : 24 November 2023

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta

Pembimbing 1



Agussalim, M.Si., Ph.D

19710801 202121 1 006

Pembimbing 2



Hikmatul Akbar, M.Si

19740612 202121 1 005

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : EMAH YUSIANTI
No. MAHASISWA : 151190039
JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN PEMERINTAH INDIA DALAM
MELINDUNGI HAK ANAK YATIM PIATU
SELAMA PANDEMI COVID-19 TAHUN
2020-2022

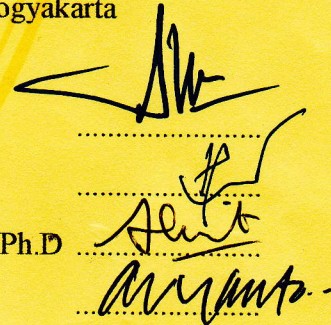
Skripsi ini telah Dipertahankan di depan Tim Penguji
di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta

Hari : Rabu
Tanggal : 6 Desember 2023
Waktu : 12:00 WIB-13:00 WIB
Tempat : Ruang Laboratorium Organisasi Internasional

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta

TIM PENGUJI

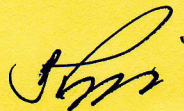
Dosen Pembimbing I : Agussalim, M.Si., Ph.D
Dosen Pembimbing II : Hikmatul Akbar, M.Si
Dosen Penguji I : Ariesani Hermawanto, M.Si., Ph.D
Dosen penguji II : Aryanta Nugraha, Ph.D



Handwritten signatures of the examiners: Agussalim, Hikmatul Akbar, Ariesani Hermawanto, and Aryanta Nugraha.

Mengetahui

Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional



Handwritten signature of the Head of the Department, Dr. Saptopo Bambang Ilkodar.

Dr. Saptopo Bambang Ilkodar, M.Si

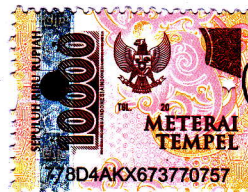
NIP. 19660917 202121 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya menyatakan bahwa tulisan ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa saya melakukan kecurangan/penjiplakan/plagiat, maka saya siap menerima sanksi akademik, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Desember 2023

Yang Menyatakan



Handwritten signature of Emah Yusianti.

Emah Yusianti

NIM 151190039

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Dzat Yang Maha Besar dengan segala kebesaran-Nya, Alhamdulillah atas Rahmat dan Hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kebijakan Pemerintah India dalam Melindungi Hak Anak Yatim Piatu Selama Pandemi COVID-19 Tahun 2020-2022”** dengan baik. Sholawat dan salam dari Allah semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah Allah yang terakhir dan penyempurna seluruh risalah-Nya.

Terselesainya skripsi ini merupakan kerjasama dengan banyak pihak yang telah bekerja keras dalam penyelesaiannya. Maka dari itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang selalu menjadi rumah bagi saya di segala musim, keadaan dan juga kondisi.
2. Diri Saya sendiri yang selalu menyimpan energi untuk memulai lagi, meskipun keinginan untuk menyerah sudah terbesit berkali-kali.
3. Bapak dan Ibu Sahroni, orang tua saya yang telah, selalu dan akan menyayangi, mempercayai, dan memberikan segala dukungan yang saya butuhkan.
4. Bapak Agussalim, M.Si., Ph.D selaku pembimbing I yang dengan sabar mengarahkan dan memberikan masukan selama skripsi ini berjalan.
5. Bapak Hikmatul Akbar, M.Si, selaku pembimbing II yang dengan teliti dan sabar dalam memberikan koreksi terhadap karya tulis penulis.
6. Bapak Drs. Muharjono, M.Si, selama dosen wali yang juga berkontribusi memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Ariesani Hermawanto, M.Si., Ph.D, selaku dosen yang juga memberikan pengarahan dan masukan sehingga skripsi ini menjadi lebih baik lagi.

8. Bapak Aryanta Nugraha, Ph.D selaku dosen penguji 2 yang turut memberikan arahan dan saran agar skripsi ini menjadi lebih baik lagi.
9. TU jurusan yang dengan sabar memberikan bantuan dalam berbagai aspek untuk kelancaran proses skripsi penulis.
10. Semua kakak dan adik saya yang selalu menjadi saudara paling menyebalkan, supportive sekaligus menjadi rindu paling menyakkan saat di perantauan.
11. Prissy, Yeppi, Anisa, Tarisa dan Nadhia, selaku sahabat terbaik saya. Tanpa kalian kehidupan perkuliahan tidak akan semenyenangkan ini. Istilahnya, bagaikan taman tak berbunga, bagaikan sayur tanpa garam, dan bagaikan soup tanpa merica. Alias hambar! I love you to the moon and back again!
12. Sara dan Nahdhiyah yang sudah menjadi tetangga kos terbaik yang pernah saya miliki. Tanpa kalian kehidupan kos-ku tidak akan seberwarna ini.
13. Alin, Rizqiana, dan Muhammad Rafi Izulhaq yang sudah menjadi sahabat saya dari masa putih abu-abu dan sampai saat ini tidak pernah melupakan saya.
14. Tipe-X, ST 12, Taylor Swift, Bruno Mars, Blackpink, Adele, Ariana Grande, Lana Del Rey, dan lain-lain yang musiknya telah menemani saya sepanjang pengerjaan skripsi.
15. Seluruh teman-teman seangkatan HI UPN “Veteran” Yogyakarta 2019 yang mendukung dan tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, semoga Allah SWT selalu mencintai dan memudahkan semua urusan kalian.

Yogyakarta, 19 Desember 2023

Yang menyatakan

Emah Yusianti

ABSTRAK

Pandemi COVID-19 yang berkepanjangan di India telah mengakibatkan terjadinya krisis kemanusiaan besar-besaran pada tahun 2021, salah satu korban yang paling rentan selama pandemi berlangsung adalah anak-anak. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kebijakan Pemerintah India terhadap isu pelanggaran hak anak-anak yang kehilangan kedua orang tuanya karena Pandemi COVID-19 tahun 2020-2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kebijakan publik dari David Easton yang menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah *output* dari sistem politik yang ada terhadap *input-input* yang didapat dari lingkungan. Selain itu dalam penelitian ini juga menggunakan konsep anak yatim piatu dari UNICEF (*United Nations International Children's Emergency Fund*) dan konsep hak asasi anak dari UNCRC (*United Nations Convention on the Rights of the Child*). Dari teori dan konsep yang digunakan, peneliti menemukan bahwa berdasarkan *input* yang diterima dari masyarakat dan diproses melalui politik yang ada, Pemerintah India mengeluarkan tiga kebijakan dimana kebijakan itu memiliki masing-masing fungsinya dalam perlindungan terhadap hak anak yatim piatu selama pandemi yaitu SAMVEDNA (*Sensitizing Action on Mental Health Vulnerability through Emotional Development and Necessary Acceptance*) yang berfungsi untuk memberikan pertolongan pertama pada psikolog anak-anak, Baal Swaraj yang berfungsi menjalankan pemantauan digital dan PM CARES for Children untuk menjamin kesejahteraan anak-anak.

Kata Kunci : India, Pandemi COVID-19, Anak Yatim Piatu, Hak Anak, Kebijakan Pemerintah

**INDIAN GOVERNMENT POLICY IN PROTECTING
THE RIGHTS OF ORPHANS DURING PANDEMIC**

IN 2020-2022

ABSTRACT

The prolonged COVID-19 pandemic in India has resulted in a massive humanitarian crisis in 2021, one of the most vulnerable victims during the pandemic is children. This research aims to explain the Indian Government's policy regarding the issue of violating the rights of children who lost both parents due to the 2020-2022 COVID-19 pandemic. This research uses a qualitative approach and is descriptive in nature. The theory used in this research is public policy theory from David Easton which explains that public policy is the output of the existing political system on inputs obtained from the environment. Apart from that, this research also uses the concept of orphans from UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund) and the concept of children's human rights from the UNCRC(United Nations Convention on the Rights of the Child). From the theories and concepts used, researchers found that based on input received from society and processed through existing politics, the Indian Government issued three policies where each policy had its own function in protecting the rights of orphans during the pandemic, namely SAMVEDNA(Sensitizing Action on Mental Health Vulnerability through Emotional Development and Necessary Acceptance) which functions to providing first aid to child psychologists, Baal Swaraj whose function is to carry out digital monitoring and PM CARES for Children to ensure children's welfare.

Keywords: *India, COVID-19 Pandemic, Orphans, Children's Rights, Government Policy*

HALAMAN MOTTO:

Hiduplah seolah engkau mati besok. Belajarlah seolah engkau hidup selamanya.

-Mahatma Gandhi

Bermimpilah maka Tuhan akan memeluk mimpi-mimpimu.

-Andrea Hirata

Ketika seseorang benar-benar menginginkan sesuatu, seluruh jagat raya akan berkonspirasi membantu orang tersebut untuk mewujudkannya.

-Paulo Coelho

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
HALAMAN MOTTO	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Alasan Pemilihan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Rumusan Masalah	7
D. Kerangka Pemikiran.....	8
E. Argumen Pokok	15
F. Metode Penelitian	15
G. Tujuan dan Manfaat Penelitian	16
H. Batasan Penelitian	17
I. Sistematika Penelitian.....	18
BAB II COVID-19 DAN PENINGKATAN PELANGGARAN HAK ANAK YATIM PIATU DI INDIA TAHUN 2020- 2022	19
A. Gambaran Umum Pelanggaran Hak Anak Di India.....	20
B. Pelanggaran Hak Anak Yatim Piatu di India	24
B.1 Sebelum Pandemi COVID-19	24
B.2 Selama Pandemi COVID-19	27
C. Dinamika Kebijakan Pemerintah India Untuk Melindungi Hak Anak Yatim Piatu.....	39
D. Tantangan dan Hambatan.....	44

E.Peluang yang Dimiliki India	49
BAB III LANGKAH-LANGKAH PEMERINTAH INDIA DALAM MELINDUNGI HAK ANAK YATIM PIATU DI INDIA SELAMA PANDEMI TAHUN 2020-2022.....	53
A.Inisiatif SAMVEDNA sebagai Pertolongan Psikologis Pertama untuk Anak Yatim Piatu	55
A.1 Gambaran Umum	55
A.2 Manfaat Inisiatif SAMVEDNA	55
A.3 Implementasi Inisiatif SAMVEDNA	56
A.4 Hasil dari Inisiatif SAMVEDNA	57
B.Portal <i>Baal Swaraj</i> sebagai Portal Pelacakan Online	58
B.1 Tujuan Peluncuran Portal <i>Baal Swaraj</i>	58
B.2 Objek Sasaran dari <i>Baal Swaraj</i>	59
B.3 Pelaksanaan dari Pelacakan Online	60
B.4 Hasil Skema <i>Baal Swaraj</i>	61
C.Skema <i>PM CARES for Children</i> Sebagai Dukungan Finansial.....	63
C.1 Tujuan Skema.....	63
C.2 Manfaat Skema <i>PM CARES for Children</i>	64
C.3 Implementasi <i>PM CARES for Children</i>	66
C.4 Hasil skema <i>PM CARES for Children</i>	71
D.Analisa Keberhasilan Kebijakan Pemerintah India dalam Melindungi Hak Anak Yatim Piatu Selama Pandemi	71
BAB IV KESIMPULAN	73
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Gambar I. 1 Daftar Negara dengan Kasus Corona Terbanyak di Dunia.....	3
Gambar I. 2 Tujuan Perdagangan Manusia.....	5
Gambar I. 3 Model Sistem Menurut David Easton.....	9
Gambar II. 1 Anak-Anak yang Terlibat dalam Permasalahan HAM.....	29
Gambar II. 2 Peningkatan Pernikahan Anak Selama Pandemi	35
Gambar II. 3 Dampak Pandemi terhadap Keamanan Pangan Anak Perempuan ..	38
Gambar II. 4 Dampak Pandemi terhadap Keamanan Pangan Anak Laki-Laki	38
Gambar III. 1 Poster Tele Konseling untuk Anak-Anak.....	57
Gambar III. 2 Pembuatan Poster Baal Swaraj oleh NCPCR.....	59
Gambar III. 3 Skema PM CARES for Children	64
Gambar III. 4 Alur Proses Pendaftaran Penerima.....	69
Gambar III. 5 Mekanisme Aliran Dana bagi Para Penerima	70
Tabel III. 1 Data Anak-Anak Terdampak Pandemi COVID-19	61

DAFTAR SINGKATAN

CARA	: The Central Adoption Resource Authority
CCI	: Child Care Institutions
COVID	: Coronavirus Disease
CWC	: Child Welfare Committee
HAM	: Hak Asasi Manusia
ICP	: Individual Care Plan
JJ	: Juvenile Justice
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
NCPCR	: National Commission for Protection of Child Rights
NCRB	: National Crime Records Bureau
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PM CARES	: Prime Minister's Citizen Assistance & Relief in Emergency Situation
RTE	: Right to Education
SAMVEDNA	: Sensitizing Action on Mental Health Vulnerability through Emotional Development and Necessary Acceptance
SIR	: Social Investigating Report
UDHR	: The Universal Declaration of Human Rights
UNCRC	: United Nations Convention on the Rights of the Child
UNESCO	: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

UNICEF : United Nations International Children's Emergency Fund

WHO : World Health Organization

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Pandemi COVID-19 telah menimbulkan krisis yang sangat buruk dalam berbagai aspek di seluruh dunia, mempengaruhi ekonomi, sistem kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Di antara kelompok yang paling rentan terkena dampak pandemi adalah anak-anak. Banyak anak-anak yang menjadi yatim piatu akibat kehilangan kedua orang tuanya yang meninggal terkena virus COVID-19. Dari seluruh negara yang menanggung peningkatan anak yatim piatu paling banyak adalah India. Kasus kematian orang dewasa yang disebabkan oleh COVID-19 di India tercatat sebanyak 531.917 jiwa dari total kasus terkonfirmasi sebanyak 44.995.665 jiwa.¹ Banyaknya kasus kematian ini sangat berimplikasi pada peningkatan jumlah anak yatim piatu selama Pandemi COVID-19.

Sebelum Pandemi COVID-19 terjadi, menurut data UNICEF jumlah anak yatim piatu di India sudah menyentuh angka 30 juta dari total populasi anak-anak dibawah 18 tahun sebanyak 432 juta jiwa.² Angka tersebut membuat India menjadi negara dengan jumlah anak yatim piatu terbanyak di dunia dimana satu dari sepuluh anak di India adalah anak yatim piatu. Sedangkan setelah Pandemi COVID-19, jumlah anak yatim piatu meningkat dengan pesat.

Menurut data yang terdapat di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, terdapat sebanyak 153.827 anak-anak yang kehilangan orang tuanya selama pandemi, dengan rincian 10.386 anak kehilangan kedua orang tua, 142.949 anak kehilangan salah satu orang tua,

¹ Soutik Biswas. 2022. "Why India's real COVID Toll May Never be Known". <https://www.bbc.com/news/world-asia-india-60981318>. Diunduh pada 28 Juli 2023

² Eliza Lyon. 2019. "India's 29 Million Unwanted Children". <https://westernindependent.com.au/2019/08/15/indias-29-million-unwanted-children/>. Diunduh pada 28 Juli 2023

dan 492 anak ditelantarkan.³ Data ini dilaporkan oleh NCPCR melalui sebuah portal pelacakan online.

Anak yatim piatu di India menghadapi tantangan yang besar, termasuk trauma secara emosional, kurangnya kebutuhan dasar, dan ketidakpastian mengenai masa depan. Selain itu, anak yatim piatu juga sangat beresiko terhadap bahaya lainnya karena India bukan tempat tinggal yang ramah untuk anak-anak yang tanpa penjagaan. India adalah negara dengan tingkat pelanggaran hak anak yang tinggi. Di India setidaknya terdapat 143 pelecehan seksual anak setiap hari, 10,13 juta anak dalam kisaran usia 5 hingga 14 tahun dipekerjakan sebagai pekerja paksa, lebih dari 30 juta anak-anak putus sekolah dan 223 juta anak perempuan menjadi pengantin dini.⁴ Angka yang sangat tinggi ini adalah ancaman yang sangat menakutkan anak yatim piatu, terutama dalam keadaan Pandemi COVID-19 yang sangat sulit.

Peningkatan yang pesat terhadap jumlah anak yatim piatu di India sangat mengkhawatirkan, terlebih India adalah negara dengan tingkat kejahatan anak yang sangat tinggi. Kerentanan anak yatim piatu yang dihadapkan dengan berbagai macam bahaya yang mengancam, menuntut Kebijakan Pemerintah maka hal ini menarik untuk dikaji lebih dalam lagi dengan judul, “Kebijakan Pemerintah India dalam Melindungi Hak Anak Yatim Piatu Selama Pandemi COVID-19”.

B. Latar Belakang Masalah

Salah satu penyakit menular yang mewabah secara pandemi dan berpotensi untuk menyerang keamanan suatu negara adalah Coronavirus Disease (COVID-19). Menurut data WHO, virus COVID-19 sudah

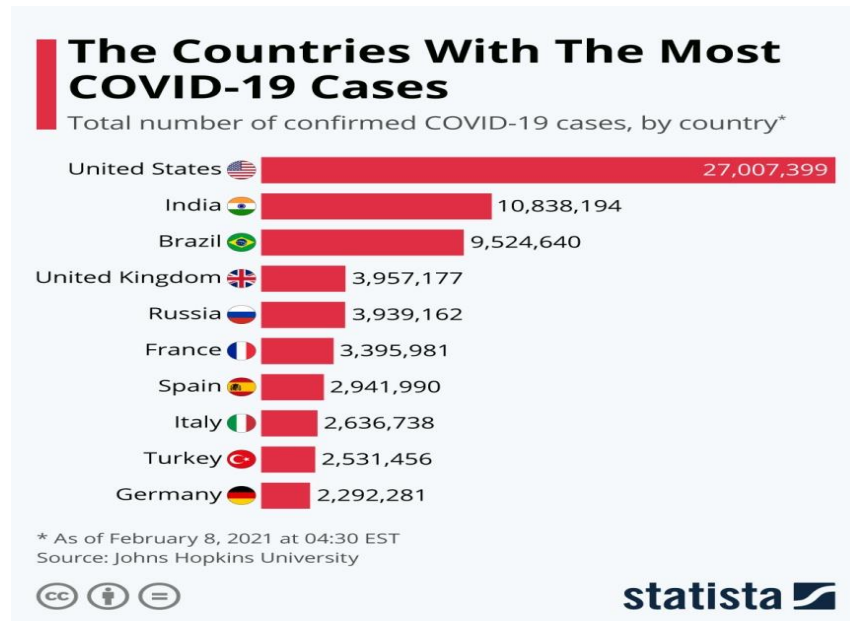
³ PIB Delhi. 2022. “Lancet Article Sophisticated Trickery Intended to Create Panic Among Citizens, Divorced from Truth and Ground Reality”. <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1802393>. Diunduh pada 4 Juli 2023

⁴ Neelam Makhijani. 2021. “Saving the Lost Children of COVID-19”. <https://www.forbesindia.com/blog/coronavirus/saving-the-lost-children-of-covid-19/>. Diunduh pada 4 April 2023

memakan korban jutaan manusia dari seluruh negara yang terimbas. Hingga 31 Desember 2020 sudah 1.813.188 korban meninggal akibat Pandemi COVID-19.⁵

Gambar I. 1

Daftar Negara dengan Kasus Corona Terbanyak di Dunia



Sumber gambar: Martin Armstrong. 2021. “The Countries With The Most COVID-19 Cases”. <https://www.statista.com/chart/21467/countries-most-covid-19-cases/>. Di unduh pada 1 Agustus 2023

Terlihat dari gambar di atas, India adalah negara dengan kasus corona terbanyak kedua pada tahun 2021. Awal mula COVID-19 memasuki wilayah India adalah dimulai dari kota Kerala. Kasus pertama dikonfirmasi ditemukan di Kerala pada 30 Januari 2020 dimana ada mahasiswa kedokteran yang baru saja kembali dari Wuhan, China yang merupakan tempat pertama di mana virus pertama kali ditemukan. Setelah kasus pertama terkonfirmasi pada 30 Januari, jumlah total pasien terkonfirmasi mencapai 107 pada 15 Maret, dan sejak saat itu, jumlah kasus positif terus meningkat. Dalam 15 hari (15 hingga 30 Maret), kasus

⁵ WHO. 2023. “The True Death Toll of COVID-19 Estimating Global Excess Mortality”. <https://www.who.int/data/stories/the-true-death-toll-of-covid-19-estimating-global-excess-mortality>. Diunduh pada 31 Juli 2023

COVID-19 yang terkonfirmasi di India menjadi berlipat 10 kali lipat. Per 30 Maret, India melewati lebih dari 1.071 kasus dengan 29 kematian.

Awalnya India dianggap telah menangani kasus COVID-19 dengan baik karena jumlah kasus positif COVID-19 menjadi rendah sejak diberlakukan kebijakan *lockdown* nasional pada 24 Maret. Namun, pada fase akhir penguncian, India mengalami jumlah kasus yang banyak dengan total 190.648 kasus positif dengan kasus kematian sebanyak 5.407. Kota-kota seperti Ahmedabad, Bengaluru, Bhopal, Chennai, Delhi, Hyderabad, Indore, Jaipur, dan Kolkata diidentifikasi sebagai kota metropolitan besar yang menyumbang hampir 40% kasus COVID-19 di India. Kasus corona di India terus mengalami kenaikan angka yang signifikan. Per 11 Juli 2020, India menjadi negara ketiga yang paling banyak terinfeksi COVID-19 dengan 292.258 kasus dengan kematian 22.674 kasus.

Pandemi COVID-19 bukan hanya sekadar ancaman kesehatan. Lebih jauh lagi, COVID-19 mengakibatkan kemiskinan, hilangnya mata pencaharian jutaan orang, migrasi internal, dan mengakibatkan kematian. Meskipun COVID-19 tidak memberikan dampak langsung kepada anak-anak, namun tetap saja hal ini mempengaruhi anak-anak dalam banyak aspek, terutama adalah anak-anak yang kehilangan orang tuanya karena COVID-19. Anak yatim piatu berada dalam situasi yang sangat mengkhawatirkan terkait dengan pendidikan, kesehatan fisik dan mental serta perlindungan dan kesejahteraan sosial.

Pandemi COVID-19 membuat ribuan anak menjadi yatim piatu. India belum pernah menghadapi krisis anak yatim piatu sebanyak ini sebelumnya. Sebelum pandemi terjadi, jumlah anak yatim piatu di India sudah ada lebih dari 30 juta anak. Jumlah ini mengalami peningkatan yang signifikan setelah datangnya Pandemi COVID-19. Peningkatan jumlah anak yatim piatu yang sangat drastis di India juga disebabkan oleh rendahnya tingkat adopsi di India.

Komisi Nasional untuk Perlindungan Hak Anak melaporkan bahwa pada awal tahun 2021, sebanyak 3.621 anak telah kehilangan kedua orang

tuanya.⁶ Jumlah tersebut terus mengalami peningkatan yang sebanding lurus dengan meninggalnya para orang tua dikarenakan virus COVID-19 yang terus mewabah. Akibatnya hal ini mendatangkan kecemasan sekaligus ketakutan yang harus dihadapi oleh anak-anak yang menjadi yatim piatu di India. Kesehatan mental anak-anak menjadi sangat terganggu. Selain itu anak-anak tersebut juga beresiko menjadi korban perdagangan anak mengingat India adalah negara dengan angka perdagangan anak yang sangat tinggi. Di India sebanyak 3 dari 5 orang yang diperdagangkan pada tahun 2016 adalah anak-anak. Dari jumlah tersebut, 54% adalah anak perempuan dan sisanya adalah anak laki-laki.

Gambar I. 2
Tujuan Perdagangan Manusia



Sumber gambar: Jatinverma. 2020. "Only 82 Trafficking Survivors Awarded Relief In The Last 8 Years". <https://www.jatinverma.org/only-82-trafficking-survivors-awarded-relief-in-the-last-8-years>. Di unduh pada 12 Juli 2023

Berdasarkan keterangan data di atas, maka adanya tujuan perdagangan manusia yaitu ditujukan pada 5 jenis kejahatan. Dari 18.860 korban perdagangan manusia, tujuan utama adalah untuk kerja paksa (10.529), kemudian eksploitasi seksual untuk kegiatan prostitusi (4.980),

⁶ Zubeda Hamid. 2021. "Thousands of Children Have Lost Parents to COVID-19. We Urgently Need A System to Care for Them". <https://www.thehindu.com/society/thousands-of-children-have-lost-parents-to-covid-19-we-urgently-need-a-system-to-care-for-them/article34787691.ece>. Diunduh pada 10 Juli 2022

eksploitasi seksual bentuk lain (2.590), pelayanan domestic (412) dan pernikahan paksa (349).

Data lain yang dilaporkan oleh *National Crime Records Bureau* (NCRB), sebanyak 2.834 dan 2.914 anak diperdagangkan masing-masing pada tahun 2018 dan 2019.⁷ Kasus pekerja anak adalah masalah yang kompleks dengan berbagai faktor di India. India pernah menjadi negara dengan kasus pekerja anak tertinggi di dunia pada tahun 2015.⁸

Mahkamah Agung di India mendapatkan laporan bahwa selama pandemi, banyak beredar postingan-postingan adopsi anak secara *illegal* di platform media sosial seperti *whatsapp*, *facebook* dan *twitter*. Postingan itu mengungkapkan usia anak, jenis kelamin, alamat anak, fakta bahwa anak telah kehilangan orang tua karena COVID-19 dan pertanyaan mengenai ketersediaan mengadopsi anak. Mengadopsi anak memang terdengar seperti niat baik yang sangat menolong dan dibutuhkan oleh anak-anak yang kehilangan orang tuanya karena virus. Namun, adopsi *illegal* juga dikhawatirkan oleh pemerintah justru akan memasukan anak ke dalam resiko perdagangan manusia.⁹

Penutupan sekolah akibat COVID-19 juga turut meningkatkan risiko kekerasan terhadap anak-anak yatim piatu. Childline yang merupakan saluran bantuan anak nasional 24 jam telah menerima lebih dari 92.000 panggilan darurat mengenai pelecehan seksual dan kekerasan anak hanya dalam 11 hari pertama *lockdown* pada tahun 2020. Selain itu anak-anak yatim piatu rentan mengalami stres dan stigma yatim piatu COVID-19 dan mengalami isolasi sosial dan fisik yang luar biasa.

⁷ Tashafi Nazir. 2022. "World Day Against Trafficking: 8000 Children Trafficked in Last 3 Years in India, What is the Current Situation?". <https://thelogicalindian.com/humanrights/world-day-against-trafficking-36768>. Diunduh pada tanggal 4 April 2023

⁸ Gayatri Prameswaran dan Felix Gaedtke. 2015. "Millions of Children Hard at Work in India". <https://aljazeera.com/features/2015/6/12/millions-of-children-hard-at-work-in-india>. Diunduh pada tanggal 12 April 2023

⁹ News and Press Release. 2021. "Save the Children Fears Trafficking and Abuse Amid Social Media Pleas to Adopt India's COVID Orphans". <https://reliefweb.int/report/india/save-children-fears-trafficking-and-abuse-amid-social-media-pleas-adopt-india-s-covid>. Diunduh pada tanggal 5 Januari 2024

Anak-anak yatim piatu pada dasarnya mempunyai hak-hak seperti anak-anak pada umumnya yaitu hak berupa perlindungan dan keselamatan yang diatur dalam Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak atau yang dikenal dengan UNCRC. UNCRC adalah kepanjangan dari *United Nations Convention on the Rights of the Child* yang merupakan suatu konvensi internasional yang diselenggarakan oleh majelis umum PBB untuk memberikan kepastian hukum atas perlindungan hak-hak anak.

Konvensi hak-hak anak (UNCRC) memuat semua hal mengenai hak-hak anak serta kewajiban negara untuk melindungi dan menjamin hak-hak anak di negaranya. Hak-hak anak tersebut meliputi hak hidup dan berkembang, hak dilindungi, hak mendapatkan pendidikan, hak bebas dari perbuatan eksploitasi, hak bebas dari segala jenis kekerasan, hak kebebasan terhadap perolehan informasi dan lain-lain yang seluruhnya diatur di dalam UNCRC.

India turut meratifikasi UNCRC pada tahun 1992,¹⁰ dan protokol opsional lainnya mengenai pemenuhan hak-hak anak yang mengatur tentang keberlangsungan hidup, perlindungan, kesehatan, dan pendidikan anak. Berdasarkan pasal yang terkandung dalam UNCRC maka sudah seharusnya Pemerintah India bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak anak yatim piatu yang disebabkan oleh Pandemi COVID-19.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas yang menunjukkan adanya peningkatan jumlah anak yatim piatu selama pandemi, maka dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut: **“Bagaimana kebijakan Pemerintah India dalam melindungi hak anak yatim piatu selama Pandemi COVID-19 pada tahun 2020-2022?”**

¹⁰ Debarati Mukherjee. 2009. "Widespread Violation of Children's Rights in India". <https://www.dw.com/en/widespread-violation-of-childrens-rights-in-india/a-5211880>. Diunduh pada tanggal 30 November 2022

D. Kerangka Pemikiran

Teori Kebijakan Publik

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, digunakan teori kebijakan publik yang dirumuskan oleh David Easton. Teori ini berfungsi sebagai instrumen dalam menganalisis data, memecahkan masalah, serta sebagai dasar pembentukan jawaban sementara terhadap suatu rumusan masalah.

David Easton memberikan pengertian kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai-nilai kepada seluruh anggota masyarakat secara paksa.¹¹ Kebijakan publik adalah sesuatu yang sarat akan nilai. Nilai-nilai yang terdapat pada masyarakat merupakan kepentingan masyarakat atau kepentingan publik, yang kemudian akan menjadi desakan untuk pemerintah sebagai wakil-wakil masyarakat untuk memformulasikan dan mewujudkan dalam suatu bentuk yaitu kebijakan publik. Kebijakan publik yang tercipta akan mengatur pengalokasian nilai-nilai kepada seluruh anggota masyarakat tersebut secara paksa. Semua hasil rumusan dan pengalokasian nilai-nilai masyarakat adalah tindakan yang dipilih oleh pemerintah untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan definisi yang diberikan oleh Easton, maka hanya pemerintahlah yang memiliki kekuasaan untuk memilih kebijakan publik sebagai hasil untuk solusi masalah publik. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kebijakan diformulasikan oleh apa yang disebut oleh Easton sebagai : penguasa. Pemangku kekuasaan adalah sekumpulan orang yang terlibat dalam masalah sehari-hari di suatu sistem politik, mendapat pengakuan dari sebagian besar anggota sistem politik, memiliki tanggung jawab untuk masalah publik dan mengambil keputusan yang diterima dan bersifat mengikat dalam kurun waktu tertentu.¹²

David Easton menjadi pelopor atas model kebijakan yang dikenal dengan model sistem. Dalam model sistem ini, kebijakan publik dilihat

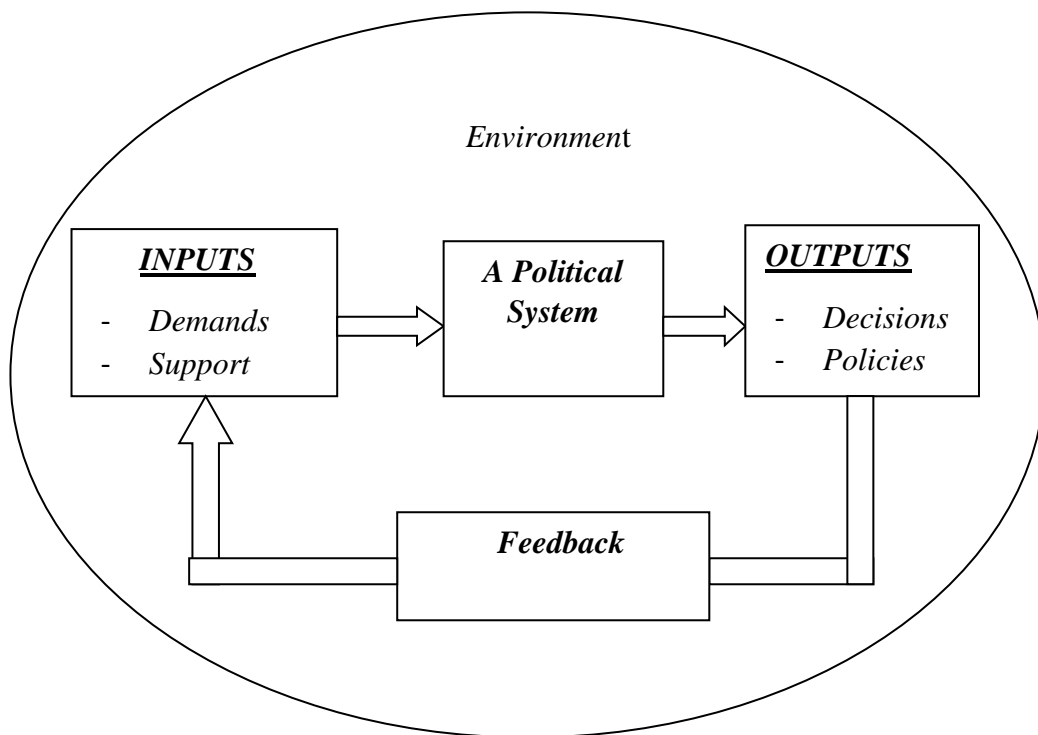
¹¹ Sobirin Malian & Muhamad Uhaib. 2021. *Kebijakan Publik dalam Negara Hukum*. Yogyakarta: Kreasi Total Media. Hal.19.

¹² Nuryanti Mustari. 2015. *Pemahaman Kebijakan Publik*. Yogyakarta: LeutikaPrio. Hal. 10-12

sebagai tanggapan dari adanya suatu sistem politik terhadap ekspektasi dan tuntutan yang muncul dari lingkungan. Kekuatan politik yang muncul dari dalam lingkungan dan mempengaruhi sistem kebijakan dan politik dipandang sebagai masukan-masukan dalam sistem kebijakan dan politik, sementara hasil-hasil yang dikeluarkan oleh sistem kebijakan dan politik dilihat sebagai keluaran dari sebuah sistem kebijakan dan politik itu sendiri. Dalam sirkulasi formulasi kebijakan maka sistem dan subsistem kebijakan akan terus berlanjut.¹³ Adapun rangkaian dalam tahapan formulasi kebijakan dalam perspektif model sistem menurut David Easton dapat diilustrasikan pada gambar berikut ini:

Gambar I. 3

Model Sistem Menurut David Easton



Sumber gambar : Eko Handoyo. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya. Hal.54.

¹³ Yulianto Kadji. 2015. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*. Gorontalo: UNG Press. Hal. 39-40

Berdasarkan model sistem di atas, masukan berisi tuntutan-tuntutan dan dukungan. Tuntutan timbul apabila individu-individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat yang berperan sebagai aktor eksternal birokrasi pemerintah maupun internal birokrasi pemerintah, setelah memperoleh respons dari lingkungannya berusaha untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan publik. Tuntutan-tuntutan dapat berupa surat ke kotak pos, surat pembaca, ataupun aksi demonstrasi yang turun ke jalan. Apapun bentuk tuntutan tetap menjadi input yang penting bagi pembuat kebijakan publik yang tidak boleh diabaikan.

Dukungan dibutuhkan untuk mendukung tuntutan-tuntutan yang telah dibuat tadi. Dalam hal ini akan muncul pertanyaan apakah sistem politik telah berhasil menciptakan keputusan-keputusan yang sesuai dengan tuntutan tadi maka implementasi keputusan-keputusan akan menjadi lebih mudah untuk dilakukan. Menerima keputusan-keputusan yang telah dibuat, mematuhi peraturan undang-undang, selalu membayar pajak, kemampuan aparat pelaksana, kualitas dan kuantitas aparat, budaya, kondisi sosial ekonomi yang kondusif, ketersediaan sarana, prasarana, dan dana adalah bentuk perwujudan dari pemberian dukungan.

Kebijakan publik adalah hasil keluaran dari aktivitas politik. Ini adalah bentuk dari apa yang pemangku kekuasaan (pemerintah) ingin lakukan atau tidak ingin lakukan, sesuatu yang bersifat otoritatif yang akan dialokasikan kepada seluruh anggota masyarakat. Pengalokasian keputusan-keputusan pemerintah kepada anggota masyarakat akan menghasilkan dampak, baik itu berupa dampak yang diharapkan dan dampak tidak diharapkan yang ternyata muncul dipermukaan seperti yang sudah diperkirakan akan terjadi atau di luar prediksi pembuat kebijakan.

Berdasarkan telaah menggunakan teori Easton, lahirnya kebijakan-kebijakan Pemerintah India untuk melindungi hak-hak anak pada masa Pandemi COVID-19 diawali oleh adanya tuntutan dari aktivis pejuang hak anak, akademisi dan tenaga pendidik pada bulan Mei 2020 sebagai suatu masukan. Lebih dari 100 akademisi, perwakilan serikat guru, organisasi

masyarakat sipil, LSM dan aktivis sosial menulis surat kepada Perdana Menteri Narendra Modi yang berisi desakan atas pengambilan langkah-langkah yang tepat untuk melindungi hak anak atas kelangsungan hidup, pendidikan, perlindungan dan perkembangan selama dan setelah Pandemi COVID-19. Memorandum yang dikirim melalui forum Right to Education (RTE) merekomendasikan tindakan segera dan perlu untuk memastikan hak-hak anak dilindungi secara efektif mengatasi masalah seperti putus sekolah, pekerja anak, dan perdagangan anak. Surat tersebut telah ditandatangani oleh akademisi dari berbagai universitas di India, perwakilan dari berbagai badan hak anak dan aktivis sosial.¹⁴ Selain adanya tuntutan dari para akademisi dan aktivis hak anak, pada tanggal 28 Mei 2021 Mahkamah Agung dan badan komite kesejahteraan anak juga mendesak pemerintah agar segera melakukan langkah-langkah yang tepat untuk melindungi nasib anak-anak yatim piatu yang jumlahnya terus bertambah banyak dan semakin berada pada situasi mencemaskan.

Didukung dengan adanya undang-undang perlindungan hak anak, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan partisipasi masyarakat, maka melalui sistem politik yang ada, pemerintah merespon tuntutan masyarakat dengan meluncurkan tiga inisiatif. Inisiatif itu meliputi SAMVEDNA, *Baal Swaraj* dan *PM CARES for Children*.

SAMVEDNA (*Sensitizing Action on Mental Health Vulnerability through Emotional Development and Necessary Acceptance*) adalah skema layanan konseling *online* yang dikembangkan oleh NCPCR (*National Commission for Protection of Child Rights*) yang merupakan badan hukum di bawah naungan Kementerian Perempuan dan Perkembangan Anak. SAMVEDNA diluncurkan pada September 2020 dengan tujuan memberikan pertolongan pertama psikologis dan dukungan emosional kepada anak-anak yang terkena dampak selama Pandemi

¹⁴ Ndtv. 2020. "Academicians, Activists Urge PM Modi to Safeguard Child Rights During and After COVID-19 Pandemic". <https://www.ndtv.com/education/academicians-activists-urge-pm-modi-to-safeguard-child-rights-during-and-after-covid-19-pandemic-2227091>. Diunduh pada tanggal 29 Mei 2023

COVID-19.¹⁵ Dalam kebijakan ini, anak yatim piatu adalah salah satu anak-anak yang akan menerima manfaat dari kebijakan.

Baal Swaraj adalah skema online yang diluncurkan pada bulan Mei 2021 oleh Pemerintah Pusat mengacu pada Undang-Undang Peradilan Anak 2015. *Baal Swaraj* memiliki dua fungsi yaitu COVID-Care dan CiSS. COVID-Care berfungsi melayani anak-anak-anak yang kehilangan salah satu atau kedua orang tuanya dengan bantuan rehabilitasi, layanan konseling, layanan medis dan layanan pendidikan. *Baal Swaraj* juga berfungsi untuk membantu proses rehabilitasi dan penyelamatan anak jalanan melalui aplikasi CiSS (Children in Street Conditions).¹⁶ Dalam skema ini, anak-anak yatim piatu adalah salah satu kelompok yang akan menerima manfaat dari adanya skema.

PM CARES For Children adalah skema yang diluncurkan pada 29 Mei 2021 untuk mendukung anak-anak yang kehilangan orang tuanya selama periode 11 Maret 2020, hingga 28 Februari 2022. Skema ini berfungsi untuk memastikan kesejahteraan anak secara berkelanjutan melalui asuransi kesehatan serta pemberdayaan melalui pendidikan. Skema *PM CARES for Children* diterapkan secara nasional untuk membekali anak-anak agar hidup mandiri dengan dukungan hingga umur 23 tahun.¹⁷ Dalam skema ini, anak yatim piatu adalah satu-satunya kelompok yang akan mendapatkan manfaat dari skema.

Lebih lanjut pemanfaatan hasil skema ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat, namun dirasakan juga oleh pembuat kebijakan, karena apabila kebijakan ini berhasil maka legitimasi pembuat kebijakan akan meningkat.

¹⁵ Ministry of Women and Child Development Government of India. 2021. "Children impacted by COVID-19 Pandemic being provided Tele Counselling through SAMVEDNA".

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1719426>. Diunduh pada 22 Mei 2023

¹⁶ Ministry of Women and Child Development Government of India. 2022. "NCPCR launches "CiSS application" under Baal Swaraj portal to help rehabilitation of children in street situation". <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1832210>. Diunduh pada 22 Mei 2023

¹⁷ Ministry of Women and Child Development Government of India. 2021. "PM CARES For Children". <https://pmcaresforchildren.in/>. Diunduh pada 22 Mei 2023.

Konsep Anak Yatim Piatu

UNICEF dan mitra globalnya mendefinisikan bahwa anak yatim piatu adalah anak di bawah usia 18 tahun yang telah kehilangan salah satu atau kedua orang tuanya karena sebab apapun. Namun kemudian definisi ini berubah pada tahun 1990 ketika Pandemi AIDS mulai menyebabkan kematian jutaan kematian orang tua di seluruh dunia, semakin banyak meninggalkan anak-anak yang tumbuh tanpa satu atau kedua orang tua. Sejak saat itu UNICEF mengadopsi terminologi yatim tunggal dan yatim ganda. Yatim tunggal adalah anak yang kehilangan salah satu orang tua, sedangkan yatim ganda berarti adalah anak-anak yang kehilangan kedua orang tuanya.¹⁸

Angka harapan hidup anak yatim piatu seringkali kurang dari 30 tahun. Masalah yang dihadapi oleh anak yatim piatu di seluruh dunia sama. Rata-rata anak-anak yatim piatu yang meninggalkan panti asuhan pada usia 18: 25% akan menjadi tunawisma, 56% akan menganggur, 27% berakhir di penjara dan 30% wanita akan menjadi orang tua dini.¹⁹

Berdasarkan definisi yang dinyatakan UNICEF maka dalam penelitian ini, subjek yang dimaksud adalah anak yatim ganda yang kehilangan kedua orang tuanya karena virus COVID-19.

Konsep Hak Asasi Anak

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap manusia, tanpa memandang ras, jenis kelamin, kebangsaan, etnis, bahasa, agama, ataupun status lainnya. Hak asasi manusia termasuk hak untuk hidup dan kebebasan, kebebasan dari perbudakan dan penyiksaan, kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak untuk bekerja dan

¹⁸ UNICEF. 2023. "Orphans". <https://www.thestarsfoundation.net/unicef-orphans.html>. Diunduh pada 11 Agustus 2023

¹⁹ Worldlifeexpectancy. 2023. "Life Expectancy of Orphans". <https://www.worldlifeexpectancy.com/life-expectancy-of-orphans>. Diunduh pada 31 Juli 2023

pendidikan. Setiap manusia berhak atas semua hak tersebut tanpa adanya diskriminasi.²⁰

Isu tentang penegakan dan perlindungan hak asasi manusia sudah ramai di perjuangkan setelah berakhirnya Perang Dunia II. Hal ini disebabkan banyaknya pelanggaran hak asasi manusia selama berlangsungnya perang. Melihat banyaknya jumlah korban pelanggaran hak asasi manusia pada Perang Dunia II tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Majelis Umum pada 10 Desember 1948, mengacu pada resolusi No.217 A (III) mendeklarasikan suatu standar guna menegakan hak asasi manusia bersama untuk seluruh dunia dan semua manusia yakni *The Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*.

Anak pada masa pra-UDHR merupakan salah satu entitas manusia yang termarginalisasi dalam ranah hak asasi manusia. Setelah hak asasi manusia dideklarasikan, kemudian menyusul adanya perjanjian internasional dan konvensi yang menjamin hak anak seperti UNCRC yang diratifikasi secara bersama oleh negara-negara di seluruh dunia (termasuk India) demi menjamin dan menegakkan hak-hak asasi anak.

Pemerintah India telah bekerja sama dengan organisasi internasional dan LSM untuk melindungi hak-hak anak di negaranya melalui undang-undang, program-program, dan berbagai kampanye kesadaran. Namun, masih banyak hal yang harus dilakukan India untuk mengatasi isu pelanggaran hak anak yang sangat kompleks permasalahannya. Terutama setelah datangnya Pandemi COVID-19 yang menempatkan anak-anak dalam situasi yang membahayakan keberlangsungan hidup, tentu Pemerintah India harus membuat kebijakan baru untuk anak-anak terkait situasi pandemi.

²⁰ United Nations. 2020. "Human Rights". <https://www.un.org/en/global-issues/human-rights> . Diunduh pada tanggal 18 April 2023

E. Argumen Pokok

Berdasarkan pertanyaan penelitian dan kerangka pemikiran di atas maka dapat diajukan argumen pokok bahwa kebijakan Pemerintah India dalam melindungi hak anak pada masa Pandemi COVID-19 yaitu dengan meluncurkan 3 skema meliputi, SAMVEDNA sebagai pertolongan pertama psikologi, *Baal Swaraj* sebagai portal pemantauan online dan *PM CARES For Children* sebagai dukungan finansial yang berkelanjutan selama dan setelah Pandemi COVID-19 sebagai *output* dari proses politik yang ada.

F. Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasar pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk melakukan penelitian terhadap objek dengan kondisi yang alamiah (keadaan riil, tidak disetting atau dalam keadaan eksperimen) di mana peneliti adalah instrumen kuncinya dan hasil penelitiannya lebih menekankan makna daripada generalisasi.²¹ Sifat deskriptif pada penelitian kualitatif berarti penelitian akan mencoba untuk membuat gambaran umum secara sistematis, akurat, dan faktual mengenai suatu fakta, sifat, hingga hubungan antar fenomena yang diteliti. Sedangkan metode penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²²

²¹ Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Hal.9

²² Mohammad Nazir. 2014. *Metode Penelitian*. Bandung: Ghalia Indonesia. Hal.45

Dapat disimpulkan bahwa metode penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk meneliti objek, suatu kondisi, sekelompok manusia, maupun fenomena lainnya dengan kondisi alamiah atau riil (tanpa situasi eksperimen) untuk membuat gambaran umum yang sistematis atau deskripsi rinci yang faktual dan akurat. Penelitian deskriptif melibatkan satu, dua, variabel atau lebih dengan menggunakan teori dan atau konsep dalam menjelaskan suatu fenomena. Dalam penelitian yang menggunakan tipe penelitian deskriptif akan fokus pada pertanyaan “bagaimana”.

Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang melalui kegiatan studi kepustakaan atau library research. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti hanya memakai data sekunder sebagai data pokok penelitian.²³ Data sekunder yang peneliti gunakan melalui pengkajian kepustakaan yang meliputi buku-buku, jurnal, surat kabar, dokumen resmi maupun sumber-sumber internet yang dapat menunjang data yang diperlukan.

Teknik Analisis Data

Metode analisa data disini lebih bersifat kualitatif, karena metode tersebut lebih mengutamakan pendekatan pengolahan data secara mendalam melalui hasil dari pengamatan atau analisa. Metode analisa data kualitatif lebih mengutamakan pemaknaan teks daripada penjumlahan unit kategori dalam isi pembahasan, yang pada dasarnya analisa tersebut merupakan hasil dari interpretasi dan penafsiran penulis.

G. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana kebijakan Pemerintah India dalam melindungi hak-hak anak yatim piatu

²³ *Ibid.* Hal.79.

selama Pandemi COVID-19. Selain itu secara teoritis penelitian ini berguna untuk meningkatkan level pemahaman terhadap pengaruh Pandemi COVID-19 terhadap keamanan HAM anak yatim piatu di India. Penulis berharap penelitian ini dapat menyumbang ilmu pengetahuan dan rujukan teori bagi siapapun yang ingin membahas isu seputar dampak Pandemi COVID-19 terhadap krisis anak yatim piatu di India dan bagaimana kebijakan Pemerintah India untuk menjamin hak-hak anak yatim piatu yang disebabkan oleh Pandemi COVID-19.

H. Batasan Penelitian

1. Batasan Waktu

Penulis membatasi ruang lingkup penelitian disini. Pada awal munculnya COVID-19 di India pada tahun 2020 sampai dengan 2022 dimana pada tahun 2020 COVID-19 muncul di India dan pada kurun tahun 2022 kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah India untuk anak yatim piatu periode waktunya berakhir . Akan tetapi tidak menutup kemungkinan penelitian ini mengambil jangkauan penelitian di luar batas waktu yang ditentukan diatas guna mendapatkan data-data pendukung untuk memperkuat eksplanasi dan analisis penelitian.

2. Batasan Materi

Ruang lingkup dari pembahasan penulis hanya terbatas pada COVID-19 dan pengaruhnya terhadap peningkatan anak yatim piatu di India serta analisis kebijakan Pemerintah India dalam melindungi hak-hak anak yatim piatu yang disebabkan oleh Pandemi COVID-19. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan penelitian ini mengambil jangkauan penelitian di luar batas materi yang ditentukan diatas guna mendapatkan data-data pendukung untuk memperkuat eksplanasi dan analisis penelitian.

I. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dalam penelitian dengan judul Kebijakan Pemerintah India dalam Melindungi Hak Anak Yatim Piatu Selama Pandemi COVID-19 Tahun 2020-2022 ini terdiri dari empat bab:

Bab I berisi alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, argumen pokok, metode penelitian yang digunakan, tujuan dan manfaat penelitian, batasan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi gambaran umum pelanggaran hak anak di India, peningkatan pelanggaran hak anak yatim piatu di India sebelum dan setelah pandemi, serta dinamika kebijakan Pemerintah India terhadap anak yatim piatu sebelum Pandemi COVID-19.

Bab III berisi penjelasan mengenai respon Pemerintah India terhadap permasalahan hak anak yatim piatu, evaluasi serta analisis hasil kebijakan.

Bab IV berisi kesimpulan dari keseluruhan pokok pembahasan, yang telah di jabarkan pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

COVID-19 DAN PENINGKATAN PELANGGARAN HAK ANAK YATIM PIATU DI INDIA TAHUN 2020- 2022

Dalam bab 2 ini akan menjelaskan lebih lanjut mengenai gambaran umum pelanggaran hak asasi anak di India, dan selanjutnya akan membahas topik pelanggaran hak-hak anak ke topik yang lebih spesifik yaitu pelanggaran hak anak yatim piatu di India dengan periode waktu sebelum dan setelah Pandemi COVID-19. Pada bagian ini juga akan menjelaskan mengenai dinamika kebijakan Pemerintah India untuk mengatasi pelanggaran terhadap hak-hak anak yatim piatu di India sebelum Pandemi COVID-19.

India merupakan negara dengan penduduk 1,4 milyar jiwa dimana memiliki kepadatan penduduk sebanyak 464 jiwa/km². Dengan jumlah populasi tersebut, India merupakan salah satu negara yang memiliki populasi kaum muda terbesar di dunia dan akan terus menjadi demikian sampai tahun 2030.²⁴ India merupakan rumah bagi 432.881.342 juta jiwa anak-anak dengan proporsi usia 0-18 tahun.²⁵ Hal ini adalah hal yang umum dikenal dengan bonus demografi, karena populasi muda suatu negara memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonominya. Namun jumlah populasi yang sangat banyak, justru memiliki dampak lain yang tidak terhindarkan untuk negara dengan kondisi berkembang, yaitu kelahiran generasi yang miskin. Terbukti bahwa dari jumlah 432.881.342 juta jiwa anak-anak di India, sebanyak hampir 50 juta anak-anak di India terlahir dengan kondisi kurang beruntung yang tidak terpenuhi hak-hak

²⁴ Rhitu Chatterjee. 2023. "India's Population Passes 1.4 Billion and that's not A Bad Thing". <https://www.wbur.org/npr/1180454049/india-is-now-the-worlds-most-populous-nation-and-thats-not-necessarily-a-bad-thi>. Diunduh pada tanggal 5 Januari 2024

²⁵ UNICEF. 2022. "UNICEF Data". <https://data.unicef.org/how-many/how-many-children-under-18-are-there-in-india/>. Diunduh pada tanggal 22 November 2022

dasarnya.²⁶ Padahal hak-hak dasar adalah hak paling krusial untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak.

A. Gambaran Umum Pelanggaran Hak Anak Di India

Kelahiran anak di India tidak hanya dipandang sebagai anugerah namun sekaligus dianggap malapetaka. Hal ini dikarenakan India adalah sebuah negara yang kelebihan populasi dengan berbagai permasalahan geografis. Keadaan sumber daya alam yang terbatas berbanding terbalik dengan tidak terbatasnya kebutuhan manusia sehingga mengakibatkan berbagai permasalahan seperti kemiskinan dan ketimpangan sosial. Hal ini turut berdampak pada kapabilitas negara dalam memenuhi hak-hak anak di negaranya sebab adanya pertumbuhan penduduk tidak diiringi dengan kemajuan ekonomi.

Anak-anak yang sangat miskin di dunia, 30% nya tinggal di India. Sebanyak 4% (17 juta) anak-anak menderita gizi buruk dan setiap tahun, sebanyak 1,4 juta anak di India sudah meninggal sebelum usianya genap 5 tahun dan hampir 25% (sekitar 108 juta) anak-anak di India tidak mempunyai akses ke pendidikan.²⁷ Namun, kemiskinan anak bukan satu-satunya masalah besar yang dihadapi oleh Pemerintah India. Karena India masih mengalami berbagai kesulitan terkait pemenuhan hak-hak anak seperti *survival*, *protection*, dan *development*. Nasib anak-anak di India yang masih ditentukan oleh kasta, agama, dan gender membuat anak-anak seperti terjebak dalam labirin ketidakadilan yang bersifat merusak dan eksploitatif.

Situasi anak-anak di India secara umum menunjukkan adanya ketidakadilan yang serius yang dialami oleh anak-anak seperti tingginya angka pernikahan anak, perawatan kesehatan yang buruk, tingginya angka kematian, terbatasnya peluang untuk mengakses pendidikan dasar, dan di

²⁶ Statista. 2022. "Poverty and Inequality in India". <https://www.statista.com/statistics/1269637/india-population-living-in-poverty-by-age-group/>.

Diunduh pada 22 Agustus 2023

²⁷ Children Incorporated. 2022. "Help Save Children in India". <https://childrenincorporated.org/help-save-children-in-india/>. Diunduh pada 25 Agustus 2023

eksploitasi sebagai pekerja seks atau dalam pekerjaan yang membahayakan anak. Pelanggaran HAM anak bukan hal baru di India dan biasa terjadi di seluruh tempat: di rumah, tempat belajar, lembaga pengasuhan anak dan di masyarakat. Kekerasan seringkali dilakukan oleh seseorang yang dikenal anak seperti teman atau kerabat dekat.²⁸

Pekerja anak adalah isu pelanggaran HAM yang tergolong berat. India menjadi salah satu negara dengan kasus pekerja anak tertinggi di India. UNCRC sudah menetapkan usia minimum untuk bekerja yaitu 18 tahun, namun India dengan segala latar belakang *socio-cultural* dan *socio-economic* secara tidak langsung melegalisasi pekerja dibawah umur. India memang telah meratifikasi UNCRC namun dengan catatan pengecualian khususnya mengenai batas usia minimum bekerja. Hal ini dibuktikan dengan adanya Undang-Undang *Child Labour (Protection and Regulation Act, 1986)*. Undang-Undang ini menyebutkan bahwa anak-anak yang berusia di atas 14 tahun sudah boleh dipekerjakan untuk pekerjaan dengan kategori tidak dianggap berbahaya.²⁹ Untuk definisi pekerjaan berbahaya, mengacu pada Undang-Undang Pabrik tahun 1948 yang menyebutkan 28 sektor seperti produksi batu bara, semen, logam, kulit, bahan kimia, kaca, dan pewarna.³⁰

Berdasarkan sensus data terakhir yang diperoleh dari UNICEF dan ILO, terdapat sebanyak 10,1 juta anak-anak yang bekerja di India di daerah-daerah dengan perusahaan pekerjaan anak terbesar di India seperti

²⁸ UNICEF. 2021. "Child Protection". <https://www.unicef.org/india/what-we-do/child-protection#:~:text=Violence%20against%20children%20is%20widespread,vioence%2C%20child%20labour%20and%20bullying>. Diunduh pada 22 Agustus 2023

²⁹ Saubharada Chatteraji. 2016. "Child Labour Bill Pased, Teens above 14 Can be Hired for Non-Hazardous Jobs". <https://www.hindustantimes.com/india-news/child-labour-bill-passed-teens-above-14-can-be-hired-for-non-hazardous-jobs/story-7wI5yP5ZS5S4GDfpF1zyMM.html>. Diunduh pada 25 Agustus 2023

³⁰ Gerard Oonk. 2016. "New Indian Child Labour Bill Allows Many Children to Work". <https://stopchildlabour.org/new-indian-child-labour-bill-allows-many-children-to-work/>. Di unduh pada 25 Agustus 2023.

Uttar Pradesh, Bihar, Rajasthan, Madhya Pradesh, dan Maharashtra.³¹ Rata-rata usia anak yang bekerja adalah usia 5-14 tahun.

Pekerja anak sangat berdampak dalam sosial ekonomi seperti mengurangi kualitas sumber daya manusia, masalah kemiskinan dan pekerja anak yang berkelanjutan, menghambat kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi, perampasan hak anak dan peluang masa depan serta mobilitas sosial dan dampak negatif terhadap kesehatan.

Pernikahan anak adalah masalah selanjutnya yang menjadi ancaman mengerikan untuk semua anak-anak di India terutama adalah anak-anak perempuan. Pernikahan anak-anak merenggut hak belajar dan bermain. Sejatinya anak-anak masih harus dipenuhi dalam hak “*love and care*” oleh orang tuanya. Namun karena tuntutan budaya masyarakat setempat dan tuntutan keluarga, anak-anak terpaksa harus sudah mengurus dan merawat anaknya sendiri. Pernikahan anak menempatkan anak-anak pada risiko tinggi terjadinya kekerasan, eksploitasi, dan pelecehan. Pernikahan anak berdampak pada semua anak-anak India baik perempuan maupun laki-laki, namun hal ini berdampak pada anak perempuan secara tidak proposional.

Laporan data dari UNICEF menunjukkan bahwa dalam setiap tahun, setidaknya 1,5 juta anak perempuan menikah di bawah usia 18 tahun. Karena pernikahan anak ini terjadi, maka kehamilan remaja juga turut menjadi masalah bagi kesehatan remaja perempuan. Laporan dari Survei Kesehatan Keluarga Nasional menyatakan bahwa sekitar 53% wanita yang menikah dalam kurun usia 15-19 tahun mulai melahirkan anak. Hal ini umum terjadi di daerah pedesaan dengan sumber daya manusia yang rendah.³²

Permasalahan yang yang mengancam perampasan hak anak-anak selanjutnya adalah **perdagangan anak**. Isu perdagangan anak adalah isu

³¹ Daily Updates. 2023. “Rise in Child Labour”. <https://www.drishtias.com/daily-updates/daily-news-editorials/rise-in-child-labour>. Diunduh pada 25 Agustus 2023

³² UNICEF. 2019. “Ending Child Marriage and Adolescent Empowerment”. <https://www.unicef.org/india/what-we-do/end-child-marriage>. Diunduh pada 25 Agustus 2023

yang sangat penting untuk segera ditindaklanjuti karena perdagangan anak memiliki kemungkinan besar anak-anak akan mengalami semua bentuk kekerasan seperti kekerasan fisik, mental, emosional, dan sosial. Menurut data dari Humanity United, setidaknya sekitar 135.000 anak-anak di India di perdagangkan setiap tahunnya. Namun, rata-rata anak yang berhasil diselamatkan hanya 2.500 anak per tahun. Anak-anak diperdagangkan ke luar negeri dan menjadi pekerja anak di kota-kota besar di India.³³ Hal ini sudah semestinya menjadi hal yang pantas untuk menjadi perhatian siapapun termasuk pemerintah dan masyarakat karena tindakan perdagangan anak sangat tidak mencerminkan perlindungan hak-hak anak. Hal ini karena biasanya anak-anak korban perdagangan dijadikan subjek prostitusi, pernikahan anak, adopsi ilegal, dipaksa bekerja dengan gaji rendah hingga dipaksa mengemis di jalanan.

Masalah seperti kemiskinan, pekerja anak dan pernikahan anak adalah tiga masalah yang memiliki masalah perpanjangan lainnya, yaitu **putus sekolah**. Berdasarkan laporan UNESCO pada tahun 2017-2018, sebanyak 35% buta huruf di dunia tinggal di India. Adanya perbedaan dalam hal bahasa, kebiasaan, budaya, dan iklim membuat perbedaan regional dalam pencapaian pendidikan di India. Beberapa daerah kekurangan fasilitas pendidikan, sementara beberapa daerah lainnya terlalu mementingkan kualitas pendidikan sehingga memiliki fasilitas yang bagus. Tamil Nadu, Kerala, Tamil Nadu, dan Uttranchal adalah negara bagian yang memiliki fasilitas pendidikan bagus di India. Masalah selanjutnya adalah, pendidikan dengan kualitas bagus selalu di monopoli oleh kasta teratas di India sehingga menyebabkan hilangnya akses kasta yang lebih rendah. Selain itu kebijakan pendidikan di India turut mengarah pada pelestarian perbedaan kasta. Kaum Dalit adalah kasta yang paling terpinggirkan di India yang mengalami nasib paling buruk dalam segala

³³ Sutirtha Sahariah. 2015. "Child Trafficking in India". <https://www.theguardian.com/global-development/2015/apr/28/child-trafficking-india-domestic-labour-chhattisgarh>. Diunduh pada 25 Agustus 2023

aspek kehidupan termasuk pendidikan.³⁴ Menurut UNICEF, diperkirakan 6,1 juta anak putus sekolah di India dan dari 100 siswa, 29% anak perempuan dan laki-laki putus sekolah sebelum menyelesaikan seluruh pendidikan dasar, dan anak-anak ini adalah anak yang paling terpinggirkan secara status sosial.³⁵

B. Pelanggaran Hak Anak Yatim Piatu di India

B.1 Sebelum Pandemi COVID-19

India merupakan negara dengan populasi anak terbanyak di dunia, yaitu berjumlah 432.881.342 juta jiwa anak-anak. Dari jumlah tersebut, 30 juta diantaranya adalah anak-anak yatim piatu yang merupakan bagian penting dari populasi kaum muda. Di antara 30 juta anak, hanya 0,5% yang tinggal di panti asuhan/sekitar 370.000 dan sisanya tinggal di jalanan atau tinggal bersama kerabat. Salah satu penyebab tingginya anak yatim piatu di India adalah karena rendahnya tingkat adopsi di India. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada tahun 2016-2017 menemukan bahwa dari 9.589 panti asuhan di India, hanya 9% (sekitar 863) yang terhubung dengan lembaga pemerintah. Ini artinya, 91% (8726) sisanya tidak dikelola langsung oleh pemerintah dan tidak berhubungan langsung dengan lembaga adopsi.³⁶

Alasan lain yang menyebabkan tingginya angka anak yatim piatu di India yaitu dikarenakan adanya norma sosial yang kompleks di India. Pandangan pertama bahwa anak yatim piatu memang seharusnya berada di panti asuhan. Selain itu ada budaya India yang juga tidak mendukung budaya adopsi, dimana budaya ini menghargai gagasan kesuburan dan keluarga. Adopsi berarti pertanda cacat atau kekurangan dalam diri

³⁴ Pranav Prabhu. 2021. "Illiteracy in India". <https://storymaps.arcgis.com/stories/e6304125e0394b758b2b10d906155b85>. Diunduh pada 30 Agustus 2023

³⁵ UNICEF. 2020. "Education". <https://www.unicef.org/india/what-we-do/education>. Diunduh pada tanggal 30 Agustus 2023

³⁶ David Keenan. 2023. "The Situation of Orphans in India". <https://borgenproject.org/orphans-in-india/#:~:text=India%20has%20the%20second%20largest,portion%20of%20the%20youth%20population..> Diunduh pada tanggal 29 Agustus 2023

individu di pernikahan.³⁷ Maka dari itu, adopsi adalah pilihan terakhir yang akan dipilih oleh pasangan menikah yang gagal untuk memiliki anak biologis.

Menjadi anak yatim piatu bukanlah hal yang mudah, terlebih lagi di sebuah negara yang memiliki banyak catatan mengenai pelanggaran HAM anak seperti di India. Anak-anak yang hidup di jalanan beresiko tinggi terhadap segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Namun, anak-anak yang tinggal di panti asuhan juga tidak sepenuhnya aman dan terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi.

Menurut data dari Rainbow Homes, sebanyak 18 juta lebih anak-anak di India hidup di jalan baik anak yang ditelantarkan maupun yatim piatu. 70% (7.700.000) anak-anak tersebut adalah anak laki-laki sedangkan 30% (3.300.000) adalah perempuan. Banyak hal buruk yang dialami oleh anak-anak saat menjalani kehidupan sebagai anak yatim piatu yang hidup di jalan. Satu dari empat anak mengaku sering kelaparan dan tidak makan secara teratur.³⁸ Dua dari lima anak menyaksikan pelecehan verbal, fisik atau seksual, penyiksaan, dan bentuk kekerasan lainnya. Sekitar 24% (2.640.000) anak usia sekolah mengalami buta huruf. Sebanyak 24% anak-anak yang di jalan menjadi pekerja anak dengan berbagai macam pekerjaan seperti mengemis, menjual bunga, menjual kain, menjual makanan dan barang-barang lainnya, melakukan pekerjaan serabutan di restoran, menyemir sepatu dan pekerjaan konstruksi. Sekitar 15% (lebih dari 1 juta) anak-anak sudah kecanduan zat-zat seperti narkoba, tembakau, dan lainnya.

Pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak biasanya memakan waktu 10-13 jam sehari, hal ini akhirnya membuat anak-anak kelelahan

³⁷ Vidyadhar Prabhudesai. 2022. "Why India Struggles with Low Adoption Rates, Caste, Class to Genetics". <https://theprint.in/india/why-india-struggles-with-low-adoption-rates-caste-class-to-genetics>. Diunduh pada tanggal 5 Januari 2024

³⁸ Sankunni K. 2021. "Estimated 18 Million Children Live on Streets in India, Home to One of the Largest Child Populations on Earth". <https://www.timesnownews.com/india/article/estimated-18-million-children-live-on-streets-in-india-home-to-one-of-the-largest-child-populations-on-earth/744047>. Diunduh pada tanggal 5 Januari 2024

dan kehilangan motivasi untuk mengenyam pendidikan. Padahal, pendidikan dapat memberikan jalan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Sebaliknya, anak-anak jalanan dengan cepat tumbuh menjadi orang dewasa tunawisma, yang pada akhirnya menghasilkan anak-anak jalanan dan menciptakan lingkaran kehidupan jalanan yang tidak pernah berakhir.³⁹ Pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak sebagian besar dilakukan di luar ruangan, anak-anak setiap hari terpapar cuaca seperti suhu panas yang ekstrem, banjir berbahaya selama berbulan-bulan, dan dinginnya musim dingin. Tidak ada bantuan AC maupun baju hangat tambahan yang bisa dikenakan saat cuaca berubah. Hal ini tentu saja menempatkan anak-anak pada risiko lebih tinggi untuk jatuh sakit dan terkena penyakit lainnya yang lebih serius.

Sifat pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak terutama yang menjadi pemulung dan menangani sampah dan selokan, serta kondisi lingkungan yang tidak higienis, juga dapat menyebabkan anak-anak ini tertular penyakit yang jauh lebih buruk dibandingkan dengan penyakit musiman. Kurangnya layanan kesehatan yang tersedia bagi anak-anak jalanan semakin mengurangi peluang untuk pulih sepenuhnya dan mungkin berdampak buruk bagi kemampuan anak-anak untuk bekerja di masa depan.

Kehidupan anak yatim piatu di jalanan berimplikasi pada penyerahan masa kanak-kanaknya demi hidup yang menuntut untuk bekerja keras tanpa adanya waktu bermain. Tidak ada fasilitas atau kesempatan bagi anak-anak untuk menjadi anak-anak yang sesungguhnya, kecuali dengan bantuan. Sayangnya, 78% (lebih dari 8 juta) anak-anak yang hidup di jalanan tidak menyadari adanya bantuan polisi dan LSM.⁴⁰

Selain tidak mendapatkan pemenuhan hak-hak dasar sebagai anak-anak, anak yatim piatu yang hidup di jalanan juga tidak terpenuhi hak keamanannya. Sebab, menurut NCPCR di India, sekitar 40.000 anak

³⁹ Alisa N. 2022. "Volunteer with the Street Children of India". <https://www.goeco.org/article/street-children-of-india/>. Diunduh pada 1 September 2023

⁴⁰ *Ibid*

diculik setiap tahun.⁴¹ Anak jalanan yang hidup tanpa pengawasan dan perlindungan orang tua menjadi sangat rentan diculik dan diperdagangkan.

Anak yatim piatu yang hidup di panti asuhan juga belum tentu memiliki kehidupan yang lebih baik, meskipun setidaknya sedikit lebih baik dari anak yatim piatu yang hidup di jalanan. Anak yatim piatu yang tinggal di panti asuhan terutama panti asuhan yang tidak dikelola oleh pemerintah juga rentan terhadap kekerasan, terkena malnutrisi dan putus sekolah.

B.2 Selama Pandemi COVID-19

Sejak awal pandemi, sebanyak 44.995.665 kasus telah dilaporkan dengan setidaknya 1 dari 2.574 penduduk telah meninggal akibat virus corona, dengan total 531.917 kematian.⁴²

Kasus kematian yang tinggi karena corona di India, mengakibatkan masalah baru lainnya yaitu krisis anak yatim piatu. Jumlah total anak yatim piatu yang sudah didata oleh Pemerintah India selama 2 tahun pandemi berjumlah 10.386 anak. Sepuluh negara bagian yang memiliki jumlah anak yatim piatu paling banyak dimulai dari Madhya Pradesh (1.794), disusul oleh Odisha (1.610), Gujarat (1.210), kemudian Maharashtra (718), Rajasthan (714), Karnataka (573), dan Uttar Pradesh (554), Andhra Pradesh (418), Tamil Nadu (339), dan Bihar (313).⁴³ Namun, dari banyaknya jumlah anak yatim piatu yang kehilangan kedua orang tuanya karena pandemi hanya 928 anak yang ditempatkan di panti asuhan.

⁴¹ Paalika Singh. 2022. "Street Children: the Neglected Pathology". <https://www.orfonline.org/expert-speak/street-children-the-neglected-pathology/>. Diunduh pada 2 September 2023

⁴² The New York Times. 2023. "Tracking Coronavirus in India: Latest Map and Case Count". <https://www.nytimes.com/interactive/2021/world/india-covid-cases.html>. Diunduh pada 17 Juli 2023

⁴³ PIB Delhi. 2022. "Lancet Article Sophisticated Trickery Intended to Create Panic Among Citizens, Divorced from Truth and Ground Reality". <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1802393>. Diunduh pada 23 Juli 2023

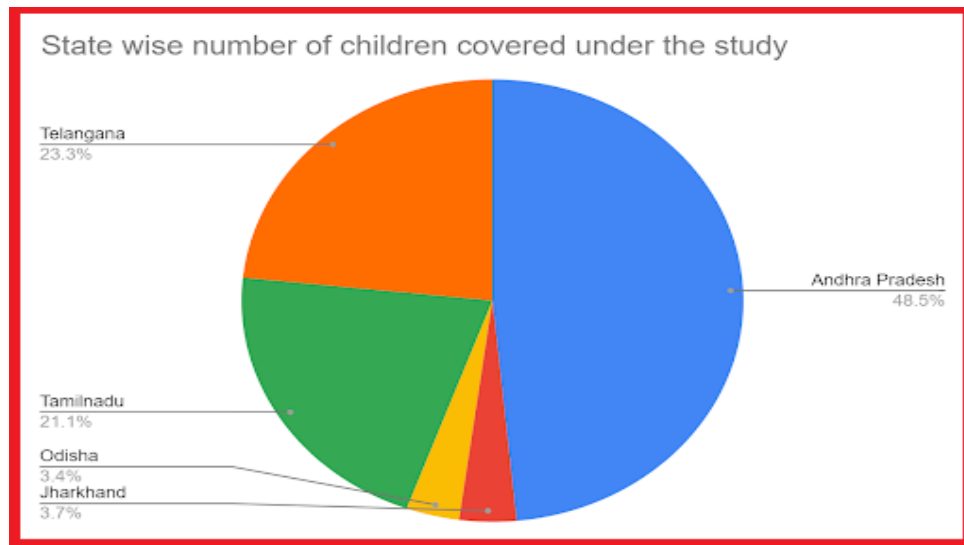
Anak yatim piatu adalah kelompok yang paling rentan dalam situasi pandemi. Berbagai penyebab mengapa anak-anak ini digolongkan sebagai kelompok yang paling rentan dalam pandemi adalah karena keberadaan anak-anak yang masih bergantung dengan orang tua, anak-anak membutuhkan afeksi, perawatan, empati, dan dukungan dari orang dewasa yang dapat melindungi mereka karena mereka belum memiliki kapabilitas untuk melindungi diri sendiri. Namun pandemi yang mewabah mengakibatkan anak-anak harus menerima keadaan untuk ditinggal oleh orang tua yang meninggal karena terjangkit virus.

Anak-anak yatim piatu di India hidup dalam ketidakpastian dengan berbagai ancaman kejahatan yang selalu mengintai mereka. Hal ini diperburuk dengan adanya sistem adopsi yang sangat sulit di India sehingga membuat para calon orang tua adopsi menjadi berubah pikiran untuk melakukan adopsi. Proses adopsi di India memiliki proses yang sangat lambat karena membutuhkan izin dari badan pengadilan dan memerlukan waktu sampai empat tahun. Karena rendahnya tingkat adopsi, anak-anak menjadi terlantar, kesulitan mendapatkan makanan, tempat tinggal yang layak, pakaian yang nyaman dan lingkungan yang aman. Sistem adopsi yang sangat ketat di India membuat jumlah adopsi yang terjadi sangat rendah. Selama Pandemi COVID-19, hanya sejumlah 3.351 anak yang diadopsi dari jumlah total 30 juta lebih anak yatim piatu di India.⁴⁴

⁴⁴ Ilmuk. 2021. "The State of India's Orphaned Children Crisis". <https://www.ilmuk.org/news/the-state-of-india-s-orphaned-children-crisis/>. Diunduh pada 25 Juli 2023

Gambar II. 1

Anak-Anak yang Terlibat dalam Permasalahan HAM



Sumber gambar: Thangaperumal, dkk. 2022. “Fewer Meals, Doing Paid Work: What A Study of Children who Lost Parents to COVID Shows”. <https://scroll.in/article/1034953/fewer-meals-doing-paid-work-what-a-study-of-children-who-lost-parents-to-covid-shows>. Di unduh pada 14 Agustus 2023.

Dari gambar II.1 diatas menjelaskan sebuah survei antara bulan Juni dan Agustus terhadap 3.825 anak dari 2.230 yang telah kehilangan orang tua di 18 distrik di lima negara bagian menemukan bahwa anak-anak yatim piatu lebih memiliki tingkat kelaparan yang signifikan, tingkat putus sekolah yang tinggi dan lebih beresiko untuk bergabung menjadi pekerja dibawah umur. Studi ini dilakukan di beberapa tempat di India. Di Andhra Pradesh ditemukan sebanyak 1.855 anak yatim piatu (48,5%) dilanggar haknya, sementara itu di Jharkhand sebanyak 141 anak yatim piatu (3,7%), Odisha sebanyak 130 (3.4%), Tamil Nadu 807 (21,1%) dan Telangana sebanyak 891 (23,3%). Dari penelitian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa anak-anak yatim piatu lebih rentan mengalami kelaparan, diskriminasi hak asasi dan rentan bergabung menjadi angkatan pekerja dengan usia yang masih dibawah umur.

Pandemi COVID-19 jelas telah muncul sebagai krisis atas hak anak-anak. Banyak ancaman yang dihadapi oleh anak yatim piatu di India, terutama adalah anak-anak yang terlantar di jalanan, namun juga tidak

menutup kemungkinan bahwa anak yatim piatu yang tinggal di panti asuhan juga terhindar dari marabahaya apalagi jika panti asuhan anak memiliki administrasi yang buruk dan kekurangan dana. Berikut adalah ancaman-ancaman yang dihadapi oleh anak yatim piatu di India selama Pandemi COVID-19.

Pertama adalah masalah **kesehatan mental**. Anak-anak dalam masa pandemi dihadapkan pada gangguan mental, terutama adalah anak-anak yang kehilangan kedua orang tuanya karena virus COVID-19. Anak-anak yatim piatu mengalami trauma yang berat karena harus menyaksikan kedua orang tuanya meninggal. Kepedihan luar biasa yang harus ditanggung menyebabkan anak-anak mengalami gangguan mental seperti stress, depresi, insomnia dan anoreksia yang akhirnya mengganggu perkembangan emosional dan psikologis anak-anak.

Menurut UNICEF, jauh sebelum pandemi, sebanyak 50 juta anak-anak di India sudah mengalami masalah mental, dengan 31 anak melakukan bunuh diri setiap hari.⁴⁵ Sementara selama pandemi berlangsung, 41% populasi anak-anak mengalami gangguan mental selama dan setelah pandemi.

Komisi Nasional Perlindungan Hak Anak, dalam laporannya mengatakan bahwa sebanyak 7.999 anak kelompok usia 0-3 tahun terkena dampak pandemi, kelompok 4-7 tahun sebanyak 13.254, kelompok 14-15 tahun sebanyak 11.799 dan kelompok usia 16-18 tahun sebanyak 12.382. Namun, dari semua kelompok anak-anak, anak yatim piatu adalah yang paling rentan. Anak-anak kelompok ini mengalami kekhawatiran berkali lipat mengenai masalah kesehatan dan ketidakpastian akan masa depan karena telah kehilangan dukungan kedua orang tua. Kehilangan kedua orang tua sangat memiliki dampak emosional yang sangat mendalam untuk anak-anak karena tidak ada lagi dukungan kasih sayang, moral dan materi.

⁴⁵ UNICEF USA. 2023. "UNICEF LION FUND: Protecting India's Most Vulnerable Children". <https://www.unicefusa.org/what-unicef-does/childrens-protection/unicef-lion-fund>. Diunduh pada 4 Agustus 2023

Kedua adalah masalah **perdagangan anak**. Perdagangan manusia termasuk pelanggaran HAM kategori berat. Namun, meskipun India sudah memiliki undang-undang terhadap pekerja anak dan prostitusi, sekitar 5000 orang diperdagangkan. Bahkan, pandemi juga tidak membuat perdagangan manusia berhenti. Sejak pandemi masuk ke India dan menyebabkan banyak anak menjadi yatim piatu, kini perdagangan manusia turut mengalami perkembangan metode. Anak-anak mulai dijadikan bisnis perdagangan manusia dengan cara adopsi illegal melalui media sosial.

Sejumlah platform media sosial banyak yang membagikan berita tentang perdagangan anak. Kondisi anak-anak yang rentan dan tanpa adanya siapapun yang merawat mereka dimanfaatkan oleh para pelaku. Pelaku membagikan foto sekaligus mencantumkan harga anak tersebut. Berdasarkan laporan *Delhi Commission For Protection of Child Rights* pada Mei 2021 banyak iklan di linimasa sosial media yang menjual anak-anak dengan harga sebesar USD 10.977 (156,8 juta rupiah) untuk anak laki-laki dan harga sejumlah USD 6.861 (98 juta rupiah) untuk anak perempuan.

Pandemi membuat perdagangan anak di India meningkat. Anak-anak India biasanya diperdagangkan di dalam negeri maupun ke negara-negara tetangga seperti Nepal, Bhutan dan Bangladesh untuk eksploitasi seks komersial. Beberapa dibujuk dari desa dan kota dengan janji palsu untuk mendapatkan pekerjaan di kota, sementara yang lain diculik oleh para pedagang manusia.

Pada awal Pandemi COVID-19 sebuah LSM di India bekerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah dan berhasil menyelamatkan 4.334 anak dari perdagangan anak di satu negara bagian saja. Kemudian, jumlah total anak-anak yang diselamatkan dari Januari 2020 hingga Juni 2021 LSM telah menyelamatkan 10.417 anak.

Tim investigasi khusus India Today telah berhasil menemukan bukti bahwa beberapa LSM ternyata turut melestarikan bisnis kotor adopsi *illegal*. Tim berhasil menyamar dan mendapatkan informasi bagaimana

adopsi *illegal* dijalankan. LSM pelaku perdagangan anak menawarkan yatim piatu COVID dibawah asuhannya sebesar Rs 75.000 (sekitar 13 juta rupiah) per anak dan Rs 1,50 lakh (sekitar 30 juta) untuk sepasang anak. LSM ini juga ternyata mencuri bayi yatim piatu COVID di rumah sakit. Pengelola LSM ini mengatakan bayi yatim piatu harga jualnya lebih tinggi daripada anak-anak yatim piatu umur 8 tahun keatas.⁴⁶

Selanjutnya adalah masalah **pekerja anak**. Pekerja anak adalah masalah lanjutan dari masalah perdagangan anak. Meskipun ada pembatasan karena Pandemi COVID-19, tetap tidak menyurutkan kasus pekerja anak di India. Angka permintaan terhadap pekerja anak selalu ada. Hal ini didukung dengan keadaan anak-anak yang telah kehilangan orang tuanya karena virus corona membuat anak terpaksa bekerja demi memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan lainnya. Menurut Sumber Daya Tenaga Kerja, Pemerintah lebih sibuk dan waspada terhadap pembatasan penguncian daripada melacak perdagangan anak yang akhirnya kelalaian pemerintah dimanfaatkan oleh para pelaku perdagangan anak-anak untuk mendistribusikan anak-anak. Pelaku perdagangan anak-anak semakin menunjukkan taringnya saat Pandemi dimana permintaan angka terhadap pekerja anak-anak semakin meningkat.

Centre Direct, sebuah LSM yang bekerja untuk pemberdayaan anak-anak dan perempuan berhasil mendapatkan informasi bahwa para pengusaha kaya dari negara bagian seperti Rajasthan, Tamil Nadu, Karnataka, Haryana dan Punjab terlibat dalam bisnis gelap perdagangan anak. Para pelaku perdagangan anak-anak ini mengirim bus-bus mewah untuk membawa anak-anak dari Bihar selama Pandemi. Para pedagang memalsukan data anak-anak berusia 12 tahun dan menunjukkan bahwa mereka telah berusia 20 tahun karena para pelaku tahu polisi akan menghentikan mereka. Namun LSM hanya berhasil mencegat 1 bus, dimana dalam bus itu berisi 6 anak yang diperdagangkan dari daerah Gaya

⁴⁶ Nitin Jain. 2021. "COVID Orphans Up for Sale". <https://www.indiatoday.in/india/story/covid-orphans-sale-illegal-adoption-sting-operation-video-1882630-2021-11-30>. Diunduh pada 3 Agustus 2023

untuk dipekerjakan di Pabrik. Sementara itu, LSM lainnya berhasil menyelamatkan 362 anak pada tahun 2020 dan 136 lainnya pada tahun 2021 di suatu pabrik di Jaipur dimana rata-rata usia anak ini adalah 10 tahun.⁴⁷

Selain itu menurut survei yang dilakukan oleh Thangaperumal, ada beban kerja tambahan dengan 29% anak perempuan dan 21% anak laki-laki sudah terlibat dalam pekerjaan rumah tangga. Enam puluh dua laki-laki dan 39 perempuan sudah mulai bekerja di luar rumah. Dari 101 anak ini, 25% bekerja di area penambangan mika untuk memunguti puing-puing dan 23% lainnya bekerja sebagai buruh tani. Anak-anak berusia lima tahun ditemukan bekerja di luar rumah, kebanyakan di area pertambangan mika di Jharkhand. Dari 101 anak yang bekerja di luar rumah, 26 anak tidak mendapatkan upah apapun. Dari 101 anak ini, 73 mulai bekerja setelah orang tua mereka meninggal. Sebagian besar anak yang bekerja di luar rumah lainnya adalah anak-anak yang berasal dari keluarga di bawah garis kemiskinan.⁴⁸

Menurut survey dari Kampanye Melawan Pekerja Anak, selama Pandemi COVID-19 berlangsung pekerja anak di kalangan komunitas rentan telah meningkat sebanyak 280%. Wawancara dilakukan di 28 distrik di Tamil Nadu terhadap 818 anak dan dari jumlah tersebut sebanyak 553 anak bersekolah sebelum Pandemi COVID-19. Namun, setelah Pandemi COVID-19 datang dan sekolah ditutup, sebanyak 419 dari 553 anak mulai bekerja.

LSM mengatakan bahwa angka kasus pekerja anak di India sebenarnya jauh lebih tinggi, namun banyak dari para korban yang tidak melaporkan kasus ke polisi. Sebagian besar karena tidak mengerti hukum dan sisanya karena takut kepada pelaku perdagangan manusia.

⁴⁷ Susmita Ghosh. 2021. "COVID-19 Made Poor More Vulnerable to Child Trafficking, Say NGOs". <https://www.indiatoday.in/coronavirus-outbreak/story/covid-19-poor-marginalised-vulnerability-child-trafficking-ngos-1812519>. Diunduh pada 3 Agustus 2023

⁴⁸ Thangaperumal, dkk. 2022. "Fewer Meals, Doing Paid Work: What A Study of Children who Lost Parents to COVID Shows". <https://scroll.in/article/1034953/fewer-meals-doing-paid-work-what-a-study-of-children-who-lost-parents-to-covid-shows>. Diunduh pada 14 Agustus 2023.

Kemudian adalah kasus **pernikahan anak**. Batas usia minimal untuk menikah di India adalah 18 tahun untuk perempuan dan 21 tahun untuk laki-laki. Namun, menurut data sensus, hampir sepertiga perempuan yang menikah di India melakukan pernikahan pertama sebelum memasuki usia 18 tahun.⁴⁹ Pernikahan anak di India adalah termasuk masalah besar yang sulit untuk ditangani karena memiliki faktor pendorong yang sangat kompleks. Banyak hal yang melatarbelakangi pernikahan anak di India seperti norma, budaya, keadaan sosial, ekonomi, serta budaya patriarki yang berkembang pesat di India.

India adalah negara dengan kasus pernikahan anak tertinggi di dunia. Menurut hasil dari penelitian UNICEF di India pada tahun 2008 terdapat 43% kejadian pernikahan anak dibawah umur 15 tahun, sedangkan pernikahan anak dibawah 18 tahun terdapat 54% atau lebih dari 25 juta anak, dan tercatat bahwa 13.000 anak perempuan di India menikah setiap harinya. Namun, dengan kerja keras Pemerintah India dan hasil kerja sama dengan berbagai organisasi internasional serta LSM India berhasil menurunkan angka pernikahan anak di India dalam sepuluh tahun terakhir. Angka pernikahan anak yang awalnya 50% turun menjadi 30% .⁵⁰

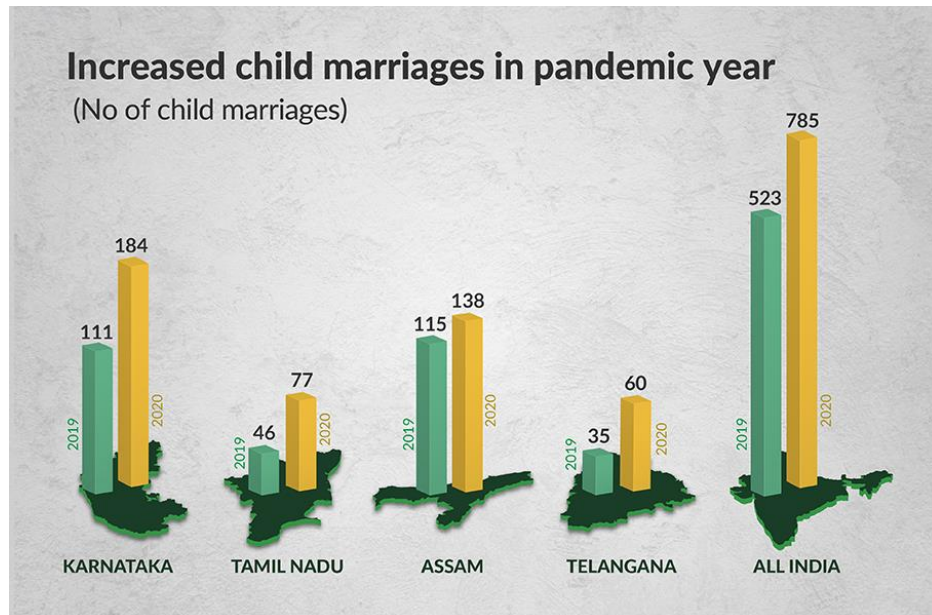
Keberhasilan India tidak berlangsung lama, karena kemudian Pandemi COVID-19 mewabah di India dan angka pernikahan anak kembali meningkat. Pandemi COVID-19 yang berdampak pada kemiskinan, serta kebijakan pemerintah dalam karantina wilayah, meningkatkan pernikahan anak dibawah umur. Menurut data yang dikumpulkan oleh Biro Catatan Kejahatan Nasional di India, jumlah pernikahan anak di India meningkat dari 523 pada tahun 2019, naik

⁴⁹ BBC News Indonesia. 2017. "Mengapa Tradisi Perkawinan Anak di India Masih bertahan?". <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-40286242>. Diunduh pada 7 Agustus 2023

⁵⁰ UNICEF. 2018. "25 Million Child Marriages Prevented in Last Decade Due to New UNICEF Estimates". <https://www.unicef.org/india/press-releases/25-million-child-marriages-prevented-last-decade-due-accelerated-progress-according>. Diunduh pada 7 Agustus 2023

menjadi 785 pada tahun 2020 yaitu saat awal Pandemi COVID-19 memasuki India.⁵¹

Gambar II. 2
Peningkatan Pernikahan Anak Selama Pandemi



Sumber gambar: B Sivakumar. 2022. “Pandemic, Lockdown Woes Led to Rise in Child Marriages in India”. <https://thefederal.com/news/pandemic-lockdown-woes-led-to-rise-in-child-marriages-in-india/>. Diunduh pada 7 Agustus 2023

Dari gambar diatas dapat dilihat perbandingan angka pernikahan dari sebelum dan sesudah pandemi. Tamil Nadu dan Karnataka adalah negara bagian yang paling tinggi peningkatannya. Tamil Nadu jumlahnya meningkat dari 46 menjadi 77, sementara di Karnataka, jumlahnya naik dari 111 menjadi 184. Assam mengalami peningkatan dari 115 menjadi 138, sementara di Telangana jumlahnya meningkat dari 35 menjadi 60.

Anak-anak yatim piatu dalam situasi pandemi sangat rentan menjadi korban pernikahan anak dibawah umur. Karena anak-anak yang kehilangan kedua orang tuanya dan diasuh oleh kerabat yang miskin,

⁵¹ B Sivakumar. 2022. “Pandemic, Lockdown Woes Led to Rise in Child Marriages in India”. <https://thefederal.com/news/pandemic-lockdown-woes-led-to-rise-in-child-marriages-in-india/>. Diunduh pada 7 Agustus 2023

menganggap bahwa menikahkan anak adalah solusi terbaik. Selain itu anak yatim piatu yang hidup di jalanan juga menghadapi ancaman diculik oleh sindikat perdagangan manusia dan dipaksa untuk menjadi pengantin anak.⁵² Sebab pernikahan anak-anak secara paksa adalah salah satu tujuan dari perdagangan manusia.

Masalah selanjutnya yang adalah **putus pendidikan**. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk masa depan anak, memberikan bekal keterampilan, ilmu pengetahuan dan kesempatan untuk kehidupan yang lebih baik. Namun, adanya penutupan sekolah akibat pandemi telah mengganggu sekolah jutaan anak di India. Penutupan sekolah yang terlalu lama juga mempengaruhi 250 juta anak di India dengan perkiraan 10 juta anak perempuan di India akan mengalami putus sekolah dan pada saat awal pandemi setidaknya ada 10 ribu anak India yang membutuhkan bantuan setiap hari dan ribuan lainnya tidur setiap malam dalam kondisi perut menahan lapar.⁵³ Sebuah survei yang dilakukan terhadap hampir 1.400 anak sekolah yang dilakukan oleh suatu organisasi pendidikan menemukan bahwa di daerah pedesaan, hanya 8% (112 anak) yang belajar daring secara teratur, 37% (518) tidak belajar sama sekali, dan sekitar setengahnya tidak dapat membaca lebih dari beberapa kata. Selain itu, berdasarkan data Sistem Informasi Pendidikan Daerah Terpadu India, angka putus sekolah di tingkat sekolah menengah mencapai 17%.⁵⁴ Angka-angka tersebut adalah bukti bahwa Pandemi COVID-19 menjadi rantai pemutus akses anak-anak terhadap akses pendidikan.

Menurut UNESCO, jangka waktu penutupan sekolah di India termasuk yang terlama di dunia. Meskipun kegiatan belajar mengajar

⁵² Jatinverma. 2020. "Only 82 Trafficking Survivors Awarded Relief In The Last 8 Years". <https://www.jatinverma.org/only-82-trafficking-survivors-awarded-relief-in-the-last-8-years>. Diunduh pada 12 Juli 2023

⁵³ Murali Krishnan. 2021. "Number of Out of School Children in India Increase During the Pandemic". <https://www.dw.com/id/jumlah-anak-putus-sekolah-di-india-meningkat-selama-pandemi/a-60270808>. Diunduh pada 12 Agustus 2020

⁵⁴ *Ibid*

kemudian dilanjutkan secara daring, jutaan anak-anak dari kelompok miskin tetap dirugikan karena tidak memiliki akses ke perangkat digital dan internet. Anak-anak di daerah miskin yang bersekolah di sekolah reguler sebelum pandemi sering kali memiliki keluarga yang terlalu miskin untuk membeli ponsel atau perangkat digital lain yang diperlukan untuk belajar daring. Kesenjangan digital ini turut memperburuk ketidaksetaraan dalam akses dan kualitas pendidikan sekolah. Pendidikan daring bukanlah pilihan untuk semua anak-anak karena hanya satu dari empat anak yang memiliki akses ke perangkat digital dan konektivitas internet.⁵⁵ Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi India.

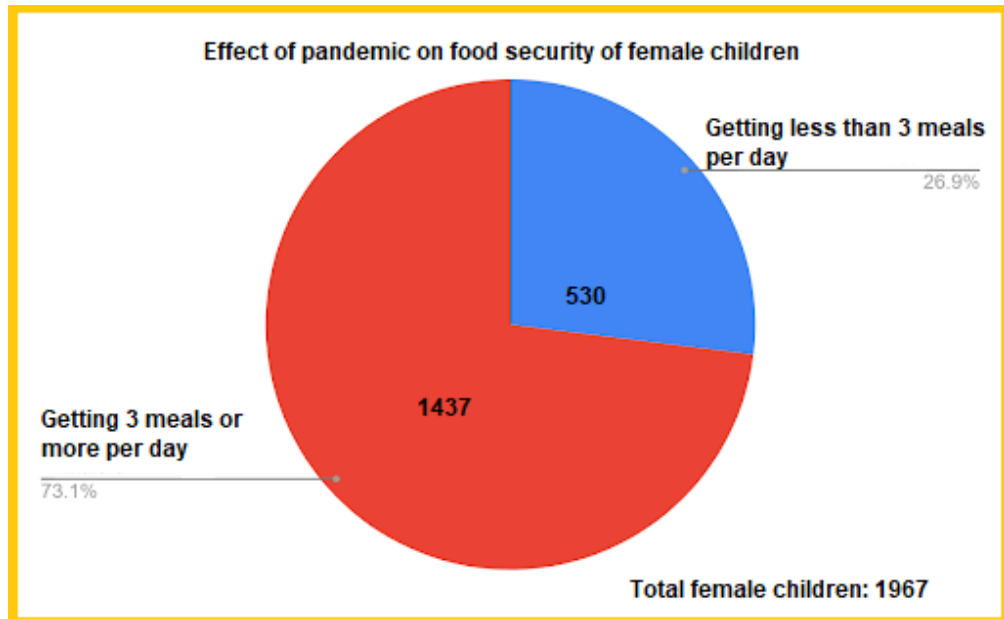
Anak-anak yatim piatu di India adalah kelompok yang paling beresiko untuk putus sekolah. Anak-anak kelompok ini seringkali kekurangan dukungan untuk melanjutkan sekolah setelah orang tuanya tidak ada. Kurangnya dukungan untuk melanjutkan pembelajaran menyebabkan terbatasnya kesempatan untuk masa depan mereka.⁵⁶ Akhirnya anak yatim piatu tidak memiliki pilihan lain selain harus melakukan segala sesuatu untuk bertahan hidup dan kemudian sekolah menjadi mimpi yang tidak masuk akal lagi untuk anak-anak yatim piatu.

Masalah besar yang selanjutnya menjadi kekhawatiran anak-anak yatim piatu adalah **kurangnya pemenuhan kebutuhan dasar**. Anak-anak yatim piatu selalu mendapat pertanyaan untuk diri sendiri bagaimana mendapatkan kebutuhan dasar tanpa adanya kedua orang tua, karena setelah kepergian orang tua anak-anak ini menjadi kekurangan akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan perawatan kesehatan. Anak-anak yatim piatu beresiko untuk tinggal di lingkungan yang tidak aman, menderita kekurangan gizi dan mendapatkan perawatan kesehatan yang buruk.

⁵⁵ *Ibid*

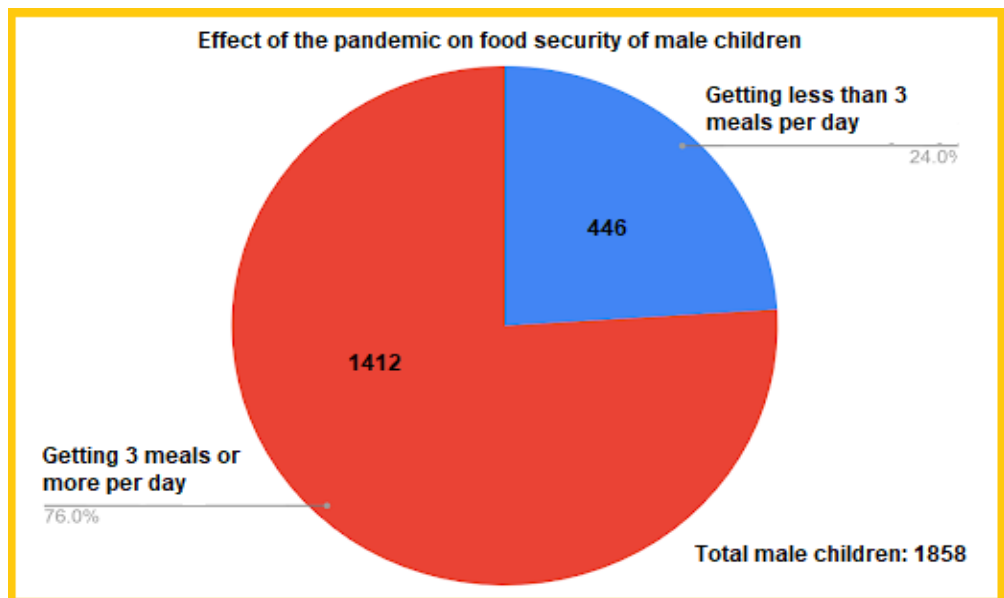
⁵⁶ Sanjay Kumar. 2021. "Children Orphaned by COVID-19 Facing Uncertain Future in India". <https://www.arabnews.com/node/1876736/world>. Diunduh pada 5 Januari 2024

Gambar II. 3
Keamanan Pangan Anak Yatim Piatu Perempuan



Sumber gambar: Thangaperumal, dkk, *Loc. Cit*

Gambar II. 4
Keamanan Pangan Anak Yatim Piatu Laki-Laki



Sumber gambar: *Ibid*

Dari gambar II.3 dan gambar II.4 di atas menggambarkan bahwa sebanyak 25% dari anak-anak yatim piatu yang disurvei makan kurang dari tiga kali sehari sejak kematian orang tuanya. Lebih banyak anak yatim

piatu perempuan yaitu sebanyak 530 dari 1967 anak (sekitar 27%) dibandingkan anak yatim piatu laki-laki yaitu sebanyak 446 dari 1858 anak (24%) yang kekurangan makan tiga kali sehari. Dari 975 anak yang menerima makan kurang dari tiga kali sehari, 956 berasal dari keluarga di bawah garis kemiskinan.

Masalah terakhir yang dihadapi anak yatim piatu selama pandemi adalah **kurangnya waktu bermain**. Bermain bagi masa kanak-kanak adalah proses yang sangat penting untuk membantu perkembangan fisik, sosial, emosional, serta kognitif anak-anak. Sebab, dengan bermain mereka belajar berbagi, berinteraksi, berkomunikasi dengan teman seantaran, mengembangkan keterampilan saraf motorik dan membantu perkembangan daya imajinasi. Selain itu, banyak manfaat lainnya juga yang didapatkan oleh anak-anak dengan bermain, seperti peningkatan kemampuan dalam memecahkan masalah, kreativitas, serta kemampuan berpikir abstrak. Manfaat lainnya adalah mengatasi stres pada anak-anak dan meningkatkan rasa percaya diri.

Menurut survei yang dilakukan oleh Thangaperumal, sebanyak 11% anak perempuan dan 8,5% anak laki-laki mengatakan bahwa mereka mendapatkan waktu untuk bermain. Sementara 63% lainnya melaporkan bahwa waktu bermain menjadi berkurang drastis sejak kematian orang tua.⁵⁷ Alasan paling signifikan adalah keterlibatan anak-anak dalam pekerjaan domestik, terpaksa keluar untuk bekerja, ketakutan akan COVID-19 dan gangguan kesehatan mental setelah kematian kedua orang tua karena Pandemi COVID-19.

C. Dinamika Kebijakan Pemerintah India Untuk Melindungi Hak Anak Yatim Piatu

Jauh sebelum Pandemi COVID-19 berlangsung, India sudah memiliki berbagai kebijakan dan inisiatif untuk semua anak-anak termasuk anak

⁵⁷ Thangaperumal, dkk, *Loc. Cit*

yatim piatu dan kebijakan khusus untuk anak-anak yatim piatu beberapa diantaranya adalah:

1. RTE (*Right to Education Act*)

RTE adalah Undang-Undang Hak untuk Pendidikan pada tahun 2009. UU ini menjamin pendidikan dengan biaya gratis dan berkualitas bagi semua anak-anak India termasuk anak yatim piatu. Undang-Undang Hak atas Pendidikan 2009, juga dikenal sebagai Undang-Undang RTE 2009, disahkan oleh Parlemen India pada tanggal 4 Agustus 2009.⁵⁸

UU RTE menggambarkan modalitas pentingnya pendidikan gratis dan wajib bagi anak-anak berusia antara 6-14 tahun di India berdasarkan Pasal 21 (A) Konstitusi India. UU RTE mulai berlaku pada 1 April 2010. Untuk hal ini tidak ada anak yang bertanggung jawab untuk membayar biaya atau pungutan lainnya yang dapat menghalangi anak-anak yatim piatu dan anak-anak lainnya untuk mengejar dan menyelesaikan pendidikan dasar. Pendidikan gratis juga mencakup penyediaan buku pelajaran, seragam, perlengkapan alat tulis dan materi pendidikan khusus bagi anak berkelainan guna mengurangi beban biaya sekolah.⁵⁹ Undang-Undang RTE mengatur:

- a. Hak anak atas pendidikan gratis dan wajib sampai tamat pendidikan dasar
- b. Pasal ini menjelaskan bahwa 'wajib belajar' berarti kewajiban pemerintah untuk menyediakan pendidikan dasar gratis dan menjamin penerimaan wajib, kehadiran dan penyelesaian pendidikan dasar bagi setiap anak dalam kelompok usia enam sampai empat belas tahun. 'Gratis' berarti bahwa tidak ada seorang anak pun yang diwajibkan membayar biaya atau

⁵⁸ Igorav Sharma. 2021. "What is Right to Education Act (RTE Act)?" <https://timesofindia.indiatimes.com/readersblog/igoravsharma/what-is-right-to-education-act-rte-act-32034/>. Diunduh pada 15 Agustus 2023

⁵⁹ *Ibid*

pungutan atau pengeluaran apa pun yang dapat menghalanginya untuk mengejar dan menyelesaikan pendidikan dasar.

- c. Undang-undang tersebut membuat ketentuan bagi anak yang tidak diterima untuk diterima di kelas yang sesuai dengan usianya.
- d. Peraturan ini merinci tugas dan tanggung jawab pemerintah terkait, otoritas lokal dan orang tua dalam menyediakan pendidikan gratis dan wajib, serta pembagian tanggung jawab keuangan dan lainnya antara Pemerintah Pusat dan Negara Bagian.
- e. Peraturan ini menetapkan norma-norma dan standar-standar yang berkaitan antara lain dengan bangunan dan infrastruktur, hari kerja sekolah, jam kerja guru.
- f. Hal ini memungkinkan penempatan guru yang rasional dengan memastikan bahwa rasio murid-guru yang ditentukan dipertahankan untuk setiap sekolah, bukan hanya sebagai rata-rata untuk Negara Bagian atau Distrik atau Blok, sehingga memastikan bahwa tidak ada ketidakseimbangan perkotaan-pedesaan dalam penempatan guru. Undang-undang ini juga mengatur larangan penempatan guru untuk pekerjaan non-pendidikan, selain sensus sepuluh tahun, pemilihan otoritas lokal, badan legislatif dan parlemen negara bagian, dan bantuan bencana.
- g. Peraturan ini mengatur penunjukan guru-guru yang terlatih dengan baik, yaitu guru-guru dengan persyaratan masuk dan kualifikasi akademis.
- h. Konvensi ini melarang hukuman fisik dan pelecehan mental; prosedur penyaringan untuk penerimaan anak; biaya kapitasi; les privat oleh guru dan pengelolaan sekolah tanpa pengakuan,

- i. Hal ini mengatur pengembangan kurikulum yang selaras dengan nilai-nilai yang diabadikan dalam Konstitusi, dan yang akan menjamin perkembangan anak secara menyeluruh, membangun pengetahuan, potensi dan bakat anak serta menjadikan anak bebas dari rasa takut, trauma dan kecemasan melalui sistem pembelajaran yang ramah anak dan berpusat pada anak.

2. *National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR)*

Komisi Nasional Perlindungan Anak-Anak didirikan pada tahun 2005 untuk mengawasi dan melindungi hak-hak anak di India, termasuk anak yatim piatu. Di bawah UU ini, “hak anak” merupakan hak-hak yang diadopsi dalam Konvensi PBB tentang Hak Anak pada November 1989 yang diratifikasi oleh Pemerintah India pada 11 Desember 1992. Komisi Nasional Perlindungan Hak Anak (NCPCR) didirikan berdasarkan Undang-Undang Komisi Perlindungan Hak Anak, 2005.⁶⁰ NCPCR memiliki misi memeriksa dan meninjau perlindungan yang diberikan oleh atau berdasarkan undang-undang mana pun yang saat ini berlaku untuk perlindungan hak-hak anak dan merekomendasikan langkah-langkah untuk penerapannya secara efektif.

NCPCR bertugas untuk mempromosikan hak-hak anak, menyelidiki pelanggaran hak anak dan merekomendasikan dimulainya proses dalam kasus pelanggaran hak. NCPCR juga harus melakukan penelitian terhadap semua faktor yang menghambat penikmatan hak-hak anak (yang terkena dampak terorisme, kekerasan komunal, kerusuhan, bencana alam, kekerasan dalam rumah tangga, HIV/AIDS, perdagangan, penganiayaan, penyiksaan dan eksploitasi, pornografi dan prostitusi) sekaligus merekomendasikan langkah-langkah

⁶⁰ Priti Raj. 2022. “NCPCR”. <https://www.clearias.com/ncpcr/#:~:text=The%20commission's%20role%20includes%20making,eighteen%20is%20considered%20a%20child>. Diunduh pada 15 Agustus 2023

perbaikan yang tepat. Selanjutnya NCPCR berwajib menyusun serta menganalisis data tentang anak-anak dan kemudian mempromosikan penggabungan hak-hak anak ke dalam kurikulum sekolah, pelatihan guru atau personel yang menangani anak.⁶¹

3. *Adoption and Foster Care: The Central Adoption Resource Authority (CARA)*

Otoritas Sumber Daya Adopsi Pusat (CARA) adalah badan hukum dari Kementerian Perempuan & Perkembangan Anak, Pemerintah India. Lembaga ini berfungsi sebagai badan nodal untuk adopsi anak-anak India dan diberi mandat untuk memantau dan mengatur adopsi dalam negeri dan antar negara. CARA ditunjuk sebagai Otoritas Pusat untuk menangani adopsi antar negara sesuai dengan ketentuan Konvensi Den Haag tentang Adopsi Antar Negara, 1993, yang diratifikasi oleh Pemerintah India pada tahun 2003. CARA terutama berurusan dengan adopsi anak-anak yatim piatu, terlantar dan diserahkan melalui agen adopsi yang terkait / diakui.⁶² Agar anak dapat teradopsi dengan legal, maka panti asuhan/lembaga penitipan anak harus terhubung dengan CARA.

4. *Schemes for Orphanages and Child Care Institutions*

Sesuai dengan Undang-Undang Keadilan Anak (Perawatan dan Perlindungan Anak), 2015, anak yatim piatu di negara India adalah tanggung jawab pemerintah namun tanggung jawab utama pelaksanaan adalah Negara Bagian. Pemerintah Pusat memberikan bantuan keuangan kepada Negara Bagian untuk menjalankan skema-skema

⁶¹ NCPCR. 2022. "National Commission for Protection of Child Rights". <https://ncpcr.gov.in/functions-and-powers>. Diunduh pada 15 Agustus 2023

⁶² TheLawmatics. 2021. "Orphaned Child Rights in India". <https://thelawmatics.in/orphan-child-rights-in-india/>. Diunduh pada 17 Agustus 2023

perawatan anak seperti panti asuhan untuk memberikan lingkungan yang aman dan nyaman untuk anak-anak yatim piatu.⁶³

D. Tantangan dan Hambatan

Di dalam implementasi kebijakannya, Pemerintah India mengalami berbagai tantangan dan hambatan di dalamnya. Tantangan tersebut berupa hal-hal yang bersifat normatif dalam artian hal-hal tersebut telah ada dari lama dan membudidaya sehingga sangat sulit untuk merubahnya karena telah menjadi kaidah-kaidah lokal di masyarakat. Berbagai tantangan dan hambatan yang di hadapi oleh Pemerintah India bisa datang dari masalah internal dan hal-hal yang mengandung kearifan lokal yang berisi pandangan kebudayaan dan keagamaan. Hal ini kemudian diperburuk dengan adanya pola pikir masyarakat India yang cenderung masih konservatif, kemiskinan dan terbatasnya sumber daya.

1. Stigma Sosial

Kearifan lokal di India yang kemudian di terjemahkan ke dalam bentuk nilai-nilai dan norma-norma keagamaan dan kebudayaan dapat menjadi tantangan dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan Pemerintah India dalam perlindungan hak-hak hak anak yatim piatu di India.

Agama Hindu merupakan kepercayaan mayoritas masyarakat India. Diikuti oleh Islam, Kristen, Sikh, Buddha dan Jain yang merupakan minoritas di India. Hinduisme selain mempersatukan India dengan tradisi sansekertanya, Hindu juga memiliki berbagai perbedaan internal yang menjadi penyebab terpecah belahnya masyarakat India dengan adanya konsep kasta pada stratifikasi sosial dan keagamaan. Hal inilah yang kemudian

⁶³ PIB Delhi. 2020. "Welfare Schemes for Orphan Children". <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1602395>. Diunduh pada 17 Agustus 2023

menjadi salah satu tantangan bagi terlaksananya adopsi anak yatim piatu di India.

Adopsi anak dalam masyarakat India dianggap sebagai hal yang memalukan. Menurut masyarakat India, anak merupakan representasi dari garis keturunan keluarganya. Oleh karena itu, anak harus memiliki gen dari ibu dan ayah. Maka dari itu, di India adopsi yang sangat umum bagi pasangan mandul adalah mengadopsi anak dari keluarga besar seperti sepupu atau keponakan yang kemudian di besarkan sebagai anak sendiri.

Keluarga-keluarga di India menganggap bahwa darah adalah tolak ukur dalam memandang anak. Memiliki hubungan darah yang sama dengan keluarga selalu menjadi prioritas utama dalam adopsi karena keluarga di India selalu khawatir dengan kemurnian kasta yang dimiliki. Sebab, kasta dari mayoritas anak-anak yatim piatu yang terlantar di India tidak diketahui kejelasannya, maka dari itu pasangan yang mandul bahkan lebih memilih untuk tidak memiliki anak sama sekali daripada harus mengadopsi anak dengan kasta tidak jelas.⁶⁴

2. Rendahnya Jumlah Lembaga Penitipan Anak

Di India hanya terdapat 0,5% anak yatim piatu yang masuk ke panti asuhan. Satu dari lima kabupaten di India bahkan tidak memiliki satupun panti asuhan.⁶⁵ Hal ini menyebabkan semakin banyaknya anak-anak yatim piatu yang turun ke jalan dan mengakibatkan Pemerintah India sulit untuk menjangkau anak-anak untuk memberikan bantuan.

⁶⁴ Ashwin Kalra. 2021. "Adoption and Indian Families".
<https://www.eatmy.news/2021/08/adoption-and-indian-families-struggle.html>. Di unduh pada 5 Oktober 2023

⁶⁵ Forum IAS. 2021. "Orphaned Children in India, Explained, Pointwise".
<https://blog.forumias.com/orphaned-children-in-india/>. Di unduh pada 5 September 2023

3. Sistem Kasta

Kasta keluarga dalam India menentukan banyak hal seperti pekerjaan, tingkat kesucian rohani hingga kelas sosial. Menurut pandangan Hindu, pengelompokan masyarakat ke dalam sistem kasta terbagi menjadi empat kasta utama atau varna. Masing-masing varna merepresentasikan pengelompokan kelas masyarakat Arya kuno. Secara hierarkis, kasta tertinggi diduduki Brahmins atau para pemuka agama, dilanjutkan oleh kshatriyas yang merupakan para penguasa dan pejuang, selanjutnya terdapat kasta pedagang yaitu waisya dan kasta terendah yaitu sudras yang diduduki oleh kaum biasa seperti petani dan pekerja biasa. Disamping keempat varna yang merepresentasikan masyarakat Arya kuno, terdapat pula satu kasta yang bahkan tidak layak untuk masuk kedalam sistem kasta. Kasta tersebut terdiri dari masyarakat yang dianggap sebagai kelas terbawah pada masyarakat. Masyarakat biasa menamainya dengan kasta dalit.⁶⁶ Kasta dalit sering dipandang sebelah mata sebab dianggap mengotori kesucian orang lain dan terlahir untuk dieksploitasi.

Upaya masyarakat kasta dalit untuk mendapatkan peluang yang sama, baik sekolah, pekerjaan atau hak memilih, selalu beresiko tinggi dan tidak jarang menimbulkan kekerasan bagi kaum dalit. Sistem kasta yang masih mengakar dengan kuat di India sejak berabad-abad lamanya, memberikan banyak dampak pada aspek kehidupan bermasyarakat di India termasuk kejahatan anak. Kejahatan yang ditanggung anak yatim piatu karena adanya sistem kasta ini umumnya berupa diskriminasi sosial, terbatasnya

⁶⁶ Marla. 2013. "India's Orphaned Dalits". https://www.families-for-orphans.org/2013/07/indias-orphaned-dalits_13.html. Diunduh pada tanggal 5 Januari 2024

akses ke pendidikan, ketidaksetaraan ekonomi dan bahkan akses terhadap bantuan pemerintah.⁶⁷

4. Budaya Patriarki

Budaya patriarki adalah budaya yang mengutamakan dominasi dan kontrol oleh laki-laki dalam masyarakat India. Sistem patriarki merupakan salah satu sistem yang sangat ditentang dan ditolak oleh para feminis karena paham dari konsep feminis menganggap bahwa perempuan di definisikan hanya berfungsi sebagai reproduktif saja sehingga perempuan dipandang hanya melakukan peran di rumah untuk hamil, melahirkan, mengasuh anak dan hanya mengerjakan pekerjaan domestik saja. Jadi secara tersirat, konsep ini memandang bahwa perempuan adalah kaum inferior. Akhirnya sistem patriarki menjadikan laki-laki mempunyai hak istimewa terhadap perempuan. Dominasi laki-laki tidak hanya mencakup ranah yang bersifat personal saja namun dalam ranah luas lagi seperti pendidikan, ekonomi, partisipasi politik, sosial, hukum, dan lain-lain. Hal ini berimplikasi pada kejahatan anak-anak perempuan di India seperti kekerasan dan eksploitasi, pernikahan anak serta kebebasan yang terbatas bagi anak perempuan.⁶⁸

5. Kemiskinan

Angka kemiskinan yang tinggi di India turut berdampak signifikan terhadap kejahatan anak-anak di India. Kemiskinan membuat anak-anak mengalami banyak kejahatan terutama adalah anak-anak yatim piatu. Anak-anak ini terhalang menuju akses pendidikan serta kesehatan yang layak, membuat anak terlantar

⁶⁷ *Ibid*

⁶⁸ Siva Shankar. 2021. "Breaking Patriarchy At Its Root". <https://timesofindia.indiatimes.com/readersblog/thoughtsthatstrikesme/breaking-patriarchy-at-its-root-31134/>. Diunduh pada tanggal 5 Januari 2024

sehingga tidak punya pilihan lain selain tinggal dan hidup di jalanan, selain itu kemiskinan juga mengakibatkan anak-anak lebih mudah menjadi korban pekerja anak atau perdagangan anak.⁶⁹ Penanggulangan kesenjangan ekonomi ini adalah suatu tantangan yang kompleks.

6. Besarnya Jumlah Anak Yatim Piatu di India

India memiliki jumlah populasi yatim piatu yang sangat besar yaitu hampir 30 juta anak-anak.⁷⁰ Mengidentifikasi dan memberikan bantuan kepada seluruh anak yatim piatu adalah tugas yang sulit karena hal ini menjadi tantangan logistik yang besar, terutama pada saat pandemi berlangsung karena Pemerintah India mengalami banyak keterbatasan sumber daya.

7. Kesehatan Mental

Anak yatim piatu sangat berpotensi untuk merasa jauh lebih terisolasi dan memiliki banyak kecemasan dalam hidupnya. Pemberian bantuan skema kesehatan mental yang memadai merupakan tantangan tersendiri bagi Pemerintah India, karena banyaknya jumlah anak yatim piatu membuat India cukup kewalahan apalagi dengan fasilitas kesehatan mental di India yang belum cukup memadai.

8. Keterbatasan Sumber Daya

India menghadapi keterbatasan sumber daya yang signifikan. Keterbatasan yang dihadapi seperti keterbatasan fasilitas kesehatan, keterbatasan transportasi, keterbatasan dana, keterbatasan menuju akses fasilitas dasar dan keterbatasan tenaga kerja terlatih,

⁶⁹ Humanium. 2012. "Realizing Children's Rights in India". <https://www.humanium.org/en/india/>. Diunduh pada tanggal 5 Januari 2024

⁷⁰ Ilmuk. 2021. "The State of India's Orphaned Children Crisis". <https://www.ilmuk.org/news/the-state-of-india-s-orphaned-children-crisis/>. Diunduh pada tanggal 5 Januari 2024

fasilitas serta dukungan sistem. Keterbatasan-keterbatasan ini dapat berdampak pada kemampuan Pemerintah India untuk memberikan dukungan yang memadai kepada anak-anak yatim piatu.

E. Peluang yang Dimiliki India

Disamping adanya tantangan dan hambatan yang harus dihadapi oleh Pemerintah India, tidak menutup kemungkinan bahwa Pemerintah India masih memiliki peluang dalam mewujudkan kemakmuran anak-anak yatim piatu dalam perlindungan hak-hak anak tersebut. Peluang berarti adanya kesempatan yang sifatnya mendukung terlaksananya suatu tujuan. Karena pada umumnya, beserta kesulitan juga datang kemudahan. Berbagai peluang yang muncul menjadikan India memiliki harapan di dalam ketidakpastian bagi perlindungan hak-hak anak yatim piatu di India. Hal-hal seperti terdapatnya berbagai kebijakan nasional pemerintah India yang berfungsi melindungi dan menjamin kepentingan anak-anak, kerjasama dengan Organisasi Internasional maupun LSM di India, antusiasme anak-anak dalam menyambut kebijakan Pemerintah India, dan peran media massa.

1. Undang-Undang

India telah memiliki undang-undang yang kuat dalam perlindungan yang menyeluruh terhadap hak anak. Implementasi yang kuat dari undang-undang dan kebijakan ini adalah peluang awal yang sangat penting untuk mewujudkan kepentingan semua anak-anak termasuk anak yatim piatu. Perlindungan hak-hak anak di India sudah ada dalam Preambul Konstitusi Nasional India. Undang-undang tersebut antara lain *Juvenile Justice Act 2000*, *Child Labor Act 1986*, *Prohibition of Child Marriage Act 2006*, dan *Right of Children to*

Free and Compulsary Education Act 2009.⁷¹ Hal ini telah memuat tujuan-tujuan Pemerintah India untuk menghapus tindakan kekerasan dan eksploitasi anak serta menegakkan perlindungan bagi hak-hak anak di India.

2. Kerjasama

Kerjasama Pemerintah India dengan negara lain, Organisasi Internasional, LSM, dan masyarakat India adalah peluang yang besar bagi India untuk mengentaskan anak-anak dari jurang kekerasan dan eksploitasi. Karena tanpa adanya kerjasama, akan sulit bagi Pemerintah India menangani isu pelanggaran hak anak sendirian.

3. Antusiasme Anak-Anak dan Masyarakat

Antusiasme anak-anak di India dalam menyambut kebijakan dari Pemerintah India juga termasuk peluang yang besar sekaligus '*energy booster*' bagi Pemerintah India dalam mengimplementasikan kebijakannya. Hal ini dapat dimaknai secara positif karena sudah terdapat kemauan yang besar dari anak-anak sebagai subjek utama dari kebijakan-kebijakan Pemerintah India.

Selain antusiasme anak-anak, dukungan masif dari masyarakat juga merupakan suatu pemantik api semangat untuk Pemerintah India dalam fungsionalisasi dan implementasi kebijakan-kebijakannya dalam perlindungan hak-hak anak di India khususnya anak yatim piatu.

4. Peran Media Massa

Media massa memiliki peran yang signifikan bagi Pemerintah India di dalam fungsionalisasi dan implementasi program-program kebijakannya. Penyebaran informasi melalui media massa mampu

⁷¹ Rashmi Shetty. 2021. "Child Protection Laws in India". <https://www.actionaidindia.org/child-protection-laws-in-india/>. Diunduh pada tanggal 5 Januari 2024

membantu Pemerintah mencapai tujuannya dalam pemberian dukungan kepada anak yatim piatu. Informasi kebijakan-kebijakan dari pemerintah akan sampai dengan cepat kepada masyarakat dan kemudian masyarakat akan membantu Pemerintah India dalam pendataan anak-anak yatim piatu dimana masyarakat ini berada.

Dalam bab ini dapat ditarik kesimpulan bahwa India adalah negara yang tidak ramah untuk anak-anak karena India memiliki catatan pelanggaran HAM anak yang tinggi seperti kasus pekerja anak, pernikahan anak, perdagangan anak, dan angka putus sekolah yang tinggi. Anak-anak di India banyak mengalami diskriminasi dan dilanggar hak-haknya terlebih lagi adalah anak-anak yang datang dari komunitas paling rentan seperti anak yatim piatu.

Pelanggaran hak anak sudah biasa terjadi di seluruh India. Setelah Pandemi COVID-19 datang dan mewabah di India, pelanggaran hak anak tetap terjadi dan justru mengalami peningkatan dan modifikasi seperti yang terjadi pada kasus perdagangan manusia. Pandemi COVID-19 datang merenggut nyawa ratusan orang dewasa dan meninggalkan anak-anak dalam kondisi yatim piatu. Anak-anak yatim piatu menjadi korban perdagangan manusia dengan motif adopsi di sosial media. Selain itu kasus pernikahan anak juga turut mengalami kenaikan, terbukti pada tahun 2019 sebanyak 523 kasus dan pada awal pandemi menjadi 785 kasus. Tidak hanya perdagangan manusia, anak-anak rentan juga tidak mendapatkan haknya dalam hal lain seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, waktu bermain dan keamanan kondisi psikologi.

Sebelum Pandemi COVID-19 berlangsung, India sudah berdinamika mengeluarkan beberapa kebijakan untuk melindungi hak-hak anak yatim piatu. Kebijakan yang telah diambil seperti: pendidikan gratis, pengadaan otoritas sumber daya adopsi, skema lembaga

perawatan anak, dan dibuatnya undang-undang perlindungan anak. Namun, kebijakan-kebijakan yang dibuat ini belum mampu menjangkau semua anak-anak rentan yang membutuhkan. Pelanggaran HAM terhadap anak-anak yatim piatu masih terjadi dimana saja dan pemenuhan hak-hak dasar anak-anak juga belum terlaksana dengan baik.

Untuk sinkronasi dengan apa yang telah dibahas pada bab 2 ini, maka pada bab selanjutnya akan membahas mengenai kebijakan Pemerintah India untuk melindungi hak anak yatim piatu selama Pandemi COVID-19 dengan kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2022.

BAB III
RESPON PEMERINTAH INDIA TERHADAP ISU-ISU
PELANGGARAN HAK ANAK YATIM PIATU DI INDIA
SELAMA PANDEMI TAHUN 2020-2022

Pada bab ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai respon Pemerintah India terhadap isu pelanggaran hak anak yatim piatu yang disebabkan oleh Pandemi COVID-19, dengan cara mengaplikasikan skema kebijakan pemerintah berdasarkan teori David Easton. Pemerintah India awalnya mendapatkan *input* berupa tuntutan dari masyarakat yang mendesak Pemerintah India untuk segera mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi hak-hak anak yatim piatu atas kelangsungan hidup, pendidikan, perlindungan dan perkembangan selama dan setelah Pandemi COVID-19. Maka, melalui sistem politik yang ada, Pemerintah India segera merespon tuntutan masyarakat dengan meluncurkan inisiatif berupa SAMVEDNA sebagai pertolongan psikologis anak-anak, *Baal Swaraj* sebagai portal online yang membantu rehabilitasi serta penyelamatan anak-anak yang hidup dijalanan, dan *PM CARES for Children* sebagai skema yang berfungsi untuk menjamin kesejahteraan anak-anak secara berkelanjutan. Lingkungan juga berperan dalam pembuatan kebijakan-kebijakan ini. Dengan analisis teori Easton, maka terdapat lingkungan dalam dan luar yang mempengaruhi pembuatan kebijakan. Dari dalam dipengaruhi oleh isu-isu pelanggaran hak anak dan konstitusi perlindungan hak-hak anak yang dimiliki oleh India. sementara itu, pengaruh lingkungan luar yaitu adanya Pandemi COVID-19 yang merupakan wabah menular dari China yang menyerang India dimana penderitanya banyak yang meninggal sehingga berimplikasi pada peningkatan jumlah anak yatim piatu di India. Setelah membahas mengenai kebijakan Pemerintah India, dalam bab ini juga akan melakukan analisa terhadap hasil implementasi dari kebijakan-kebijakan yang dihasilkan.

Dalam sejarah hak asasi manusia, hak anak merupakan hak yang paling banyak diratifikasi. Konvensi PBB tentang Hak Anak (UNCRC) mendefinisikan hak anak sebagai hak dan kebebasan minimum yang harus diberikan kepada setiap warga negara di bawah 18 tahun tanpa memandang ras, asal kebangsaan, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, asal usul, kekayaan, status kelahiran, kecacatan, atau karakteristik lainnya. Hak-hak anak-anak meliputi hak untuk bertahan hidup (hak untuk dilahirkan, hak atas kebutuhan pokok, hak untuk hidup bermartabat, dan hak atas layanan kesehatan), hak atas perlindungan (hak untuk dilindungi dari segala kekerasan, penelantaran, dan obat-obatan terlarang), hak untuk berpartisipasi (hak atas kebebasan berpendapat, berekspresi, berserikat, hak atas informasi, dan hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan) dan hak atas pembangunan (hak atas pendidikan, hak untuk belajar, hak untuk bersantai dan bermain, serta hak atas segala bentuk perkembangan baik secara emosional maupun fisik).⁷²

Datangnya Pandemi COVID-19 telah berdampak secara signifikan kepada anak yatim piatu sebagai entitas yang paling rentan. Selama Pandemi COVID-19 berlangsung di India, terjadi peningkatan pelanggaran hak anak-anak di India seperti perdagangan anak, pernikahan anak, pekerja anak, putusya pendidikan, dan lain-lain. Maka dari itu, masalah yang dihadapi oleh anak-anak di India terkait pelanggaran hak menyebabkan masyarakat menjadi resah dan khawatir terhadap masa depan anak-anak. Pada bulan Mei 2020, lebih dari 100 akademisi menulis surat kepada Pemerintah India yang berisi desakan atas pengambilan kebijakan yang efektif untuk mengatasi masalah yang dialami oleh anak-anak rentan pada masa Pandemi COVID-19.

Tuntutan dari masyarakat dan juga kewajiban pemerintah sebagai penanggung jawab hak anak-anak seperti yang tertuang dalam pasal 4 UNCRC menjadi masukan bagi Pemerintah untuk membuat kebijakan atas

⁷² Smile Foundation.. 2018. "Child Rights in India". <https://www.smilefoundationindia.org/child-rights/>. Diunduh pada 13 September 2023

perlindungan hak anak yatim piatu selama Pandemi COVID-19. Berikut adalah kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk melindungi hak anak yatim piatu selama Pandemi COVID-19.

A. Inisiatif SAMVEDNA sebagai Pertolongan Psikologis Pertama untuk Anak Yatim Piatu

A.1 Gambaran Umum

Inisiatif SAMVEDNA adalah respon terhadap isu kesehatan mental anak-anak yang kehilangan orang tuanya karena Pandemi COVID-19. Laporan yang disampaikan oleh UNICEF menyebutkan bahwa sebanyak 41% anak-anak mengalami gangguan mental selama pandemi.⁷³ Didalam angka itu, anak yatim piatu tentunya adalah entitas yang paling rentan. Maka dari itu, Pemerintah India meluncurkan SAMVEDNA (*Sensitizing Action on Mental Health Vulnerability through Emotional Development and Necessary Acceptance*) dengan tujuan memberikan pertolongan pertama pada psikologis anak-anak yang terkena dampak selama Pandemi COVID-19. Pemerintah menunjuk Komisi Nasional Perlindungan Hak Anak (NCPCR) untuk bertanggung jawab memberikan Tele-Konseling gratis kepada anak-anak melalui SAMVEDNA.⁷⁴

A.2 Manfaat Inisiatif SAMVEDNA

Disesuaikan dengan permasalahan dan kebutuhan mental anak-anak yang terdampak Pandemi COVID-19, maka NCPCR memberikan beberapa manfaat mengenai dukungan emosional melalui konseling jarak jauh.

⁷³ UNICEF USA. 2023. "UNICEF LION FUND: Protecting India's Most Vulnerable Children". <https://www.unicefusa.org/what-unicef-does/childrens-protection/unicef-lion-fund>. Diunduh pada 4 Agustus 2023

⁷⁴ PIB Delhi. 2021. "Children Impacted by COVID-19 Pandemic being Provided Tele Counselling through SAMVEDNA". <https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1719426>. Diunduh pada 19 Agustus 2023

Konseling jarak jauh disediakan melalui jaringan Ahli/Konselor/Psikolog yang terlatih di bawah bimbingan Dr. Shekhar Seshadri, yang merupakan seorang Profesor dari Departemen Psikiatri Anak dan Remaja yang fokus menangani masalah psikososial yang berhubungan dengan COVID-19 dengan menggunakan strategi konseling jarak jauh yang tepat sasaran.⁷⁵ Dengan begitu, maka diharapkan bahwa strategi jarak jauh ini akan menjangkau semua anak-anak rentan yang memerlukan bantuan psikologis dimanapun anak-anak berada dan kapanpun anak-anak membutuhkan.

Konseling Tele Bebas Pulsa ini diberikan kepada anak-anak rentan dari seluruh India dan termuat dalam berbagai bahasa daerah seperti Tamil, Telugu, Kannada, Oriya, Marathi, Gujarati, Bengali dan lain-lain. Dengan menyediakan pelayanan dengan berbagai jenis bahasa yang ada di India, maka diharapkan hal ini akan membuat anak-anak merasakan keadilan dan dipenuhi haknya secara setara dan tidak timpang.

A.3 Implementasi Inisiatif SAMVEDNA

Implementasi dari inisiatif SAMVEDNA yang diluncurkan pada September 2020 untuk mendampingi anak-anak rentan di tengah situasi Pandemi COVID-19 ini tidak diberikan kepada semua anak-anak. Konseling jarak jauh hanya diberikan oleh NCPCR kepada anak-anak dengan tiga kategori yaitu anak-anak yang berada di karantina/isolasi/Pusat Perawatan COVID-19, anak-anak yang memiliki orang tua atau anggota keluarga positif COVID dan orang terdekat dan anak-anak yang kehilangan kedua orang tuanya karena Pandemi COVID-19. Anak-anak yang hendak melakukan konsultasi bisa menghubungi nomor bebas pulsa dengan waktu yang telah ditentukan.

⁷⁵ *Ibid*

Gambar III. 1
Poster Tele Konseling untuk Anak-Anak



Sumber gambar: Ability India. 2020. "SAMVEDNA". <https://abilityindia.org/india-fights-covid-19/samvedna/>. Diunduh pada 17 Agustus 2023

Dari gambar III.1 dijelaskan bahwa Layanan konseling SAMVEDNA tele tersedia di nomor bebas pulsa : 1800-121-2830 dari Senin hingga Sabtu dari pukul 10.00 hingga 13.00 dan 15.00 hingga 20.00. Layanan ini khusus untuk anak-anak yang ingin berbicara dan membutuhkan konseling tentang dukungan psikologis kepada anak-anak untuk mengatasi stres, kecemasan, ketakutan, dan masalah lainnya selama pandemi. Saat anak-anak menghubungi SAMVEDNA 1800-121-2830, anak-anak akan dapat berbicara dengan konselor profesional di lingkungan yang aman.

A.4 Hasil dari Inisiatif SAMVEDNA

Menurut data yang ditulis oleh *The Times of India*, NCPDR yang bertanggung jawab menjalankan inisiatif ini melaporkan

bahwa dari bulan September 2020 hingga 7 Mei 2021, SAMVEDNA telah berhasil menyelesaikan 1.009 pengaduan yang dilakukan oleh anak-anak.⁷⁶ Dari hasil yang belum cukup banyak ini menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terhalangnya anak-anak mengakses layanan konseling gratis ini. Meskipun layanan ini gratis dan iklan telah disebar di semua sosial media dan juga berita nasional, namun masih ada beberapa anak-anak yang tidak menyadari adanya jenis pertolongan ini karena minimnya akses terhadap informasi.

B. Portal *Baal Swaraj* sebagai Portal Pelacakan Online

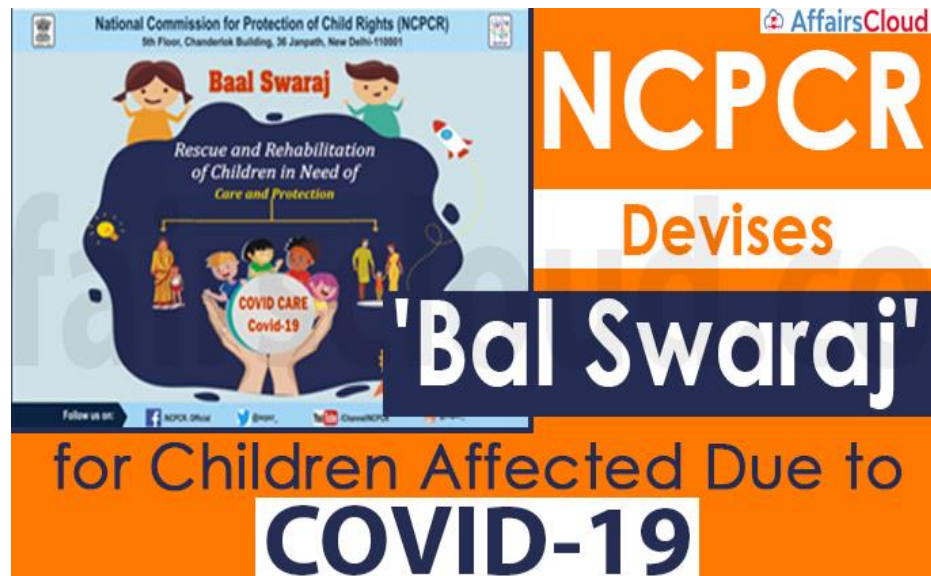
B.1 Tujuan Peluncuran Portal *Baal Swaraj*

Baal Swaraj adalah respon dari pemerintah pusat untuk menanggapi isu mengenai peningkatan anak yatim piatu yang signifikan karena Pandemi COVID-19. Pemerintah India lagi-lagi menunjuk NCPCR untuk memenuhi perannya sebagai otoritas pemantau berdasarkan pasal 109 Undang-Undang Peradilan Anak, 2015. Maka dari itu, mengingat meningkatnya jumlah anak yatim piatu dan permasalahan anak-anak akibat Pandemi COVID-19, NCPCR membentuk sebuah portal pelacakan online untuk membantu pemerintah pusat mendapatkan data dan memberikan dukungan kepada anak-anak yatim piatu yaitu portal pelacakan online bernama ‘*Baal Swaraj*’ guna perawatan dan perlindungan anak-anak yatim piatu dan anak-anak rentan lainnya yang membutuhkan pertolongan.⁷⁷

⁷⁶ PTI. 2021. “Over 1000 Children, Parents Reach Out to Govt Helpline to Tackle COVID Woes”. <https://www.livemint.com/news/india/over-1000-children-parents-reach-out-to-govt-helpline-to-tackle-covid-woes-11621334680839.html>. Diunduh pada 4 September 2023

⁷⁷ PIB Delhi. 2021. “NCPCR Asks States/UTS to Upload Data of Children Who Have Lost Both or Either of The Parent to COVID-19 on Oline Tracking Portal “*Baal Swaraj* (Bal Swaraj (COVID-Care)”. <https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1722677>. Diunduh pada 20 Agustus 2023

Gambar III. 2
Pembuatan Portal Baal Swaraj oleh NCPCR



Sumber gambar: AC Team. 2020. “NCPCR Launches “Baal Swaraj” Portal for Children Affected by COVID-19”. <https://affairscloud.com/ncpcr-launches-baal-swaraj-portal-for-children-affected-by-covid-19/>. Diunduh pada 20 Agustus 2023

Dari gambar III.2 dijelaskan bahwa portal ini dibuat dengan tujuan untuk pelacakan online dan mekanisme pemantauan *real time* digital terhadap anak-anak yang membutuhkan pengasuhan dan perlindungan. Komisi telah memperluas penggunaan portal ini untuk melacak anak-anak yang kehilangan kedua orang tuanya atau salah satu dari orang tuanya selama COVID-19 setelah Maret 2020 dan memberikan tautan dengan nama “*COVID-Care*” untuk pengunggahan data anak tersebut oleh pejabat/departemen terkait pada portal.

B.2 Objek Sasaran dari *Baal Swaraj*

Sesuai dengan latar belakang pembuatan portal Baal Swaraj yaitu untuk pemantauan terhadap anak-anak rentan, maka anak-anak yang akan terdata dalam portal ini adalah anak-anak dengan kriteria tertentu saja dimana anak yatim piatu termasuk dalam kriteria. Karena

anak-anak yang telah kehilangan dukungan keluarga atau tanpa sarana penghidupan yang nyata adalah anak-anak yang membutuhkan perawatan dan perlindungan berdasarkan pasal 2 (14) Undang-Undang Peradilan Anak, 2015 dan semua prosedur yang diberikan berdasarkan Undang-Undang untuk anak-anak tersebut harus diikuti untuk menjamin kesejahteraan dan kepentingan terbaik bagi anak.⁷⁸

Portal "*Baal Swaraj-COVID-Care*" ditujukan untuk melacak anak-anak yang terkena dampak COVID-19. Melalui data yang diisi di portal oleh petugas distrik dan pejabat negara untuk setiap anak, Komisi akan dapat memperoleh informasi tentang apakah anak tersebut dapat memperoleh hak, tunjangan, dan keuntungan moneter yang menjadi hak anak tersebut. Komisi juga akan dapat mengidentifikasi apakah negara membutuhkan bantuan keuangan untuk mendapatkan lebih banyak dana untuk memberikan manfaat berdasarkan skema yang diterapkan kepada anak-anak.

B.3 Pelaksanaan dari Pelacakan Online

Untuk melaksanakan pelacakan online, NCPCR telah berkolaborasi dengan beberapa lembaga terkait dengan beberapa tahapan.

Pertama, Mahkamah Agung mengarahkan seluruh Pejabat Distrik di seluruh Negara Bagian untuk mengisi data di portal Komisi, terkait dengan anak-anak yang menjadi yatim piatu di portal *Baal Swaraj* di bawah tautan *COVID-Care*.⁷⁹ Kemudian Komisi menginformasikan tentang arahan dari Mahkamah Agung kepada semua Negara Bagian melalui surat kepada Sekretaris Utama Departemen Perempuan dan Perkembangan Anak pada tanggal 28 Mei

⁷⁸ *Ibid*

⁷⁹ Ani. 2021. "NCPCR Devises Online Portal 'Bal Swaraj' for Children Affected by COVID-19. <https://theprint.in/india/ncpcr-devises-online-portal-bal-swaraj-for-children-affected-by-covid-19/668113/>. Diunduh pada 20 Agustus 2023

2021 dan surat kepada Sekretaris Utama pada tanggal 29 Mei 2021. Nama pengguna dan kata sandi dari setiap pengguna/Petugas Perlindungan Anak Tingka Distrik dan Pemerintah Negara Bagian juga telah dibagikan dengan semua Negara Bagian.

Dalam pelaksanaan fungsinya portal Baal Swaraj telah mengikuti kerangka enam tahap untuk rehabilitasi anak-anak. Tahap pertama adalah pengumpulan detail anak, yang dilakukan melalui portal. Tahap kedua adalah *Social Investigating Report (SIR)* yakni menyelidiki latar belakang anak. Ini dilakukan di bawah pengawasan Unit Perlindungan Anak Distrik oleh Petugas Perlindungan Anak Distrik dengan berbicara dan menasihati anak tersebut. Tahap ketiga adalah menyusun *Individual Care Plan (ICP)* untuk anak. Tahap keempat adalah urutan *Child Welfare Committee (CWC)* berdasarkan SIR yang disampaikan ke CWC. Tahap kelima adalah mengalokasikan skema dan manfaat yang dapat dimanfaatkan oleh penerima manfaat. Dan pada tahap keenam dibuat *checklist* untuk evaluasi progress yaitu *follow up*.

B.4 Hasil Skema Baal Swaraj

Melalui portal “*Baal Swaraj*” NCPCR telah berhasil melacak anak-anak yang terdampak oleh Pandemi COVID-19. Data anak yang telah terlacak dan dikumpulkan, diverifikasi dan diperiksa akan digunakan oleh Pemerintah India untuk memperluas perawatan, perlindungan, dan pertolongan yang tepat. Berikut adalah data yang berhasil dikumpulkan oleh NCPCR melalui portal *Baal Swaraj*.

Tabel III. 1
Data Anak-Anak Terdampak Pandemi COVID-19

Negara bagian	Yatim piatu	Orang tua tunggal	Ditelantarkan	Total
Kepulauan Andaman	7	267	0	274
Andhra Pradesh	418	8445	4	8867

Arunchal Pradesh	41	356	0	397
Assam	160	1918	1	2079
Bihar	313	2002	0	2315
Chandigarh	12	145	0	157
Chhattisgarh	156	318	10	484
Dadra & Nagar Haveli	16	312	0	328
Delhi	318	6438	1	6757
Goa	8	76	0	84
Gujarat	1210	13724	0	14934
Haryana	127	3582	3	3712
Himachal Pradesh	152	3074	3	3229
Jammu& Kashmir	23	637	0	660
Jharkhand	141	1319	2	1462
Karnataka	573	4512	13	5098
Kerala	113	3673	29	3815
Ladakh	2	112	0	114
Lakshadweep	1	71	0	72
Madhya Pradesh	1794	5509	359	7662
Maharashtra	718	19707	4	20429
Manipur	20	261	3	284
Meghalaya	18	111	6	135
Mizoram	13	140	0	153
Nagaland	9	142	5	156
Odisha	1617	24697	4	26318
Puducherry	12	3777	0	389
Punjab	71	1377	0	1448
Rajasthan	714	6098	18	6830
Sikkim	0	36	0	36
Tamil Nadu	339	11567	2	11908
Telangana	253	2044	1	2298
Tripura	17	45	1	63
Uttar Pradesh	554	9748	15	10317
Uttarakhand	156	3568	0	3724
Bengala Barat	290	6541	8	6839
Total	10386	142949	492	153827

Sumber gambar: PIB Delhi. 2022. "Lancet Article Sophisticated Trickery Intended to Create Panic Among Citizens, Divorced from Truth and Ground Reality: Ministry of Women and Child Development". <https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1802393>. Diunduh pada 4 September 2023

Berdasarkan tabel di atas, NCPCR melaporkan hasil dari pelacakan anak-anak melalui portal *Baal Swaraj* dari April 2020 sampai Februari 2022. Tercatat, 153.827 anak-anak: 142.949 anak kehilangan salah satu orang tua, 492 anak ditelantarkan, dan 10.386 anak kehilangan kedua orang tuanya. Selanjutnya, untuk mematuhi keputusan Mahkamah Agung, NCPCR akan memberikan rekomendasi tertentu kepada Pemerintah Negara Bagian dan otoritas distrik terkait

untuk menjamin kesejahteraan anak-anak. Hasil yang dilaporkan oleh NCPCR bukanlah hasil yang mutlak, sebab NCPCR mengalami kendala dalam pencatatan sehingga hasil aslinya jauh lebih banyak.

C. Skema *PM CARES for Children* sebagai Dukungan Finansial Berkelanjutan

C.1 Tujuan Skema

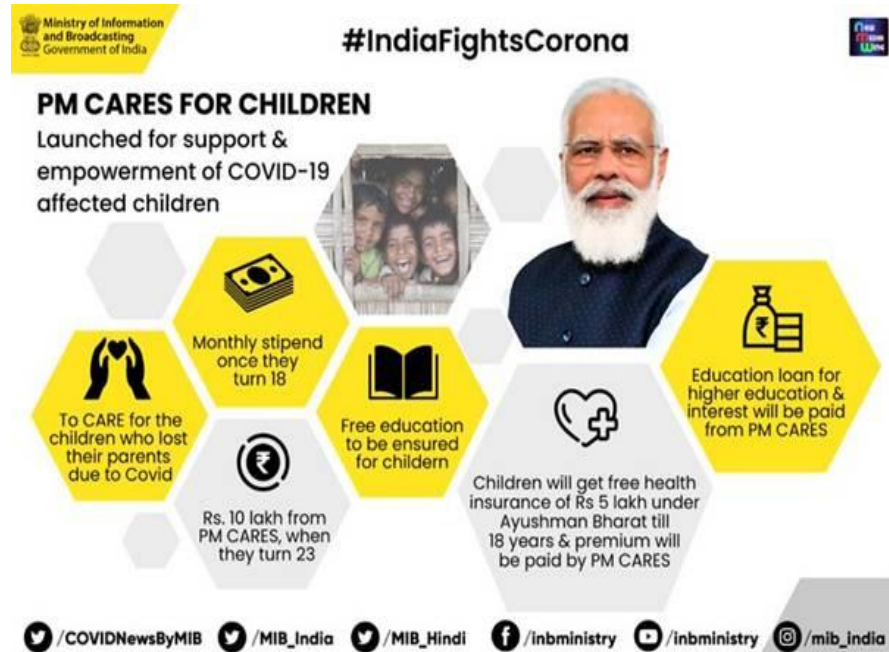
PM CARES for Children adalah skema yang diluncurkan oleh Pemerintah India pada 29 Mei 2021 untuk merespon isu mengenai kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh anak-anak yang kehilangan kedua orangtuanya karena Pandemi COVID-19. Tujuan dari skema ini adalah untuk melindungi, memberi dukungan kepada anak-anak yang telah kehilangan kedua orang tua akibat Pandemi COVID-19. Skema ini akan memastikan perawatan dan perlindungan secara menyeluruh dan berkelanjutan serta memungkinkan kesejahteraan anak yatim piatu melalui asuransi kesehatan, memberdayakan anak-anak melalui pendidikan dan membekali anak-anak untuk hidup mandiri dengan dukungan keuangan hingga usia 23 tahun.⁸⁰

⁸⁰ Vikaspedia. 2023. “PM CARES for Children’ Scheme”. <https://vikaspedia.in/schemesall/schemes-for-child/pmcares-for-children-scheme>. Diunduh pada 20 Agustus 2023

C.2 Manfaat Skema PM CARES for Children

Gambar III. 3

Skema *PM CARES for Children*



Sumber gambar: PIB Delhi. 2021. “PM CARES for Children Scheme”. <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1741528>. Diunduh pada 20 Agustus 2023.

Dari gambar III.3 di atas dijelaskan bahwa Skema *PM CARES for Children* memiliki banyak manfaat sebagai dukungan untuk anak yatim piatu dengan rincian sebagai berikut:

1. Dukungan Finansial

Dukungan finansial telah dirancang oleh pemerintah pusat melalui skema ini dengan pembuatan korpus Rs 10 lakh (setara dengan 195 juta rupiah). Korpus ini akan digunakan untuk memberikan dukungan keuangan bulanan atau tunjangan, melalui deposito tetap atas nama anak, dari usia 18 tahun selama lima tahun ke depan untuk mengurus kebutuhan pribadinya selama masa pendidikan tinggi. Bantuan ini bertujuan untuk memberikan dukungan finansial kepada anak-anak untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sebab, setelah kepergian orang tua, anak-anak harus tetap

melanjutkan kehidupan dan berhak untuk hak-hak dasarnya terpenuhi.⁸¹ Sementara itu, anak-anak di bawah usia 18 tahun juga turut mendapatkan dukungan finansial sebanyak 4000 Rupee/bulan guna mencukupi kebutuhan dasar.

2. Skema Pendidikan

Dalam upaya untuk memastikan bahwa anak yatim piatu tidak kehilangan kesempatan pendidikan, skema ini menyediakan beasiswa pendidikan seumur hidup kepada anak-anak yang telah kehilangan kedua orang tua akibat Pandemi COVID-19. Beasiswa ini akan mendukung anak yatim piatu untuk melanjutkan pendidikan tanpa perasaan terbebani dengan masalah finansial.

Anak yatim piatu di bawah 10 tahun, akan diterima di Kendriya Vidyalaya terdekat atau di sekolah swasta. Jika anak diterima di sekolah swasta, maka biaya sesuai norma RTE akan diberikan *dari PM CARES*. *PM CARES* juga akan membayar pengeluaran termasuk seragam, buku pelajaran dan buku catatan.⁸²

Anak yatim piatu yang berusia antara 11-18 tahun akan diizinkan masuk sekolah negeri manapun. Namun, jika anak tersebut tinggal bersama kakek nenek atau wali lainnya, maka anak-anak juga akan diberi izin masuk sekolah swasta terdekat.⁸³

3. Dukungan Kesehatan

Skema *PM CARES for Children* juga telah mengalokasikan dana untuk memastikan anak-anak yatim piatu mendapatkan akses yang layak terhadap layanan kesehatan. Skema ini menyediakan asuransi kesehatan untuk anak-anak, termasuk perlindungan terhadap penyakit serius atau kecelakaan. Semua anak yatim piatu

⁸¹ *Ibid*

⁸² Express News Service. 2021. "PM Announces Aid, Free Education for COVID Orphans; Pension for Employees' Next of Skin". <https://indianexpress.com/article/india/centre-to-help-children-left-orphaned-by-covid-with-education-loan-7335686/>. Diunduh pada 20 Agustus 2023

⁸³ *Ibid*

COVID-19 akan didaftarkan sebagai penerima manfaat di bawah Skema Ayushman Bharat (PM-JAY) dengan perlindungan asuransi kesehatan sebesar Rs 5 lakh (sekitar 97 juta rupiah). Jumlah itu akan diterima oleh anak-anak hingga usia 18 tahun dan akan dibayarkan oleh *PM CARES*.⁸⁴

C.3 Implementasi PM CARES for Children

Untuk mengimplementasikan skema *PM CARES for Children*, ada beberapa hal yang perlu untuk dicermati. Periode skema ini hanya berlaku untuk anak-anak yang kehilangan kedua orang tuanya/kedua pengasuhnya karena virus corona dengan periode waktu yang telah ditentukan yaitu antara 11 Maret 2020 hingga 28 Februari 2022.⁸⁵ Selain itu anak-anak penerima skema tidak boleh berusia genap 18 tahun pada tanggal kematian orang tuanya. Bagi semua anak yang kriterianya memenuhi skema maka dapat didaftarkan melalui situs <https://pmcaresforchildren.in/>.⁸⁶

PM CARES for Children juga memiliki upaya untuk melakukan rehabilitasi dengan kerabat atau anggota keluarga. Namun, apabila anggota keluarga menolak, maka anak akan ditempatkan di panti asuhan. Jika panti asuhan juga menolak, maka anak akan ditempatkan di Lembaga Penitipan Anak yang sesuai usia dan jenis kelamin.

Pelaksana skema ini terdiri dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak sebagai kementerian utama yang melaksanakan skema di tingkat pusat. Sementara itu Departemen Keadilan Sosial menjalankan peran di Negara Bagian dan Hakim Distrik akan menjadi otoritas utama di tingkat Distrik untuk pelaksanaan skema.

Sebagai kementerian utama yang menjalankan skema PM CARES for Children, maka Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak akan melakukan koordinasi dengan badan-

⁸⁴ *Ibid*

⁸⁵ PIB Delhi. 2022. "PM CARES for Children Scheme Extended up to 28th February, 2022". <https://pib.gov.in/PressReleaselframePage.aspx?PRID=1800268>. Diunduh pada 20 Agustus 2023

⁸⁶ *Ibid*

badan pusat Negara Bagian dan Distrik. Pertama-tama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak akan memberikan pengawasan dan bimbingan terhadap otoritas Negara Bagian dan Distrik. Dengan bantuan Pusat Informatika Nasional, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak akan membuat sekaligus mengawasi portal yang berisi mengenai rincian penerima manfaat. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak akan berkoordinasi dengan PM CARES Fund untuk melakukan pencairan dan ke rekening Hakim Distrik. Setelah itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak akan berkoordinasi dengan Hakim Distrik untuk mentransfer dana korpus ke rekening kantor pos penerima dan biaya lain-lain yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, dan kegiatan lainnya. Selain itu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak akan memanfaatkan portal PM CARES for Children untuk berkoordinasi dengan kementerian pemangku kepentingan seperti kementerian pendidikan, kementerian kesehatan dan kesejahteraan keluarga, dan kementerian lainnya. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak juga akan menyampaikan laporan kepada PM CARES Fund mengenai penerima manfaat jika diperlukan. Dalam melaksanakan perannya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak akan dibantu oleh Unit Manajemen Program untuk mengelola portal, untuk koordinasi keseluruhan termasuk didalamnya berkoordinasi dengan otoritas negara bagian dan distrik, pencairan dana, mengatur pertumbuhan anak, menghasilkan laporan yang diperlukan dan memantau proses.

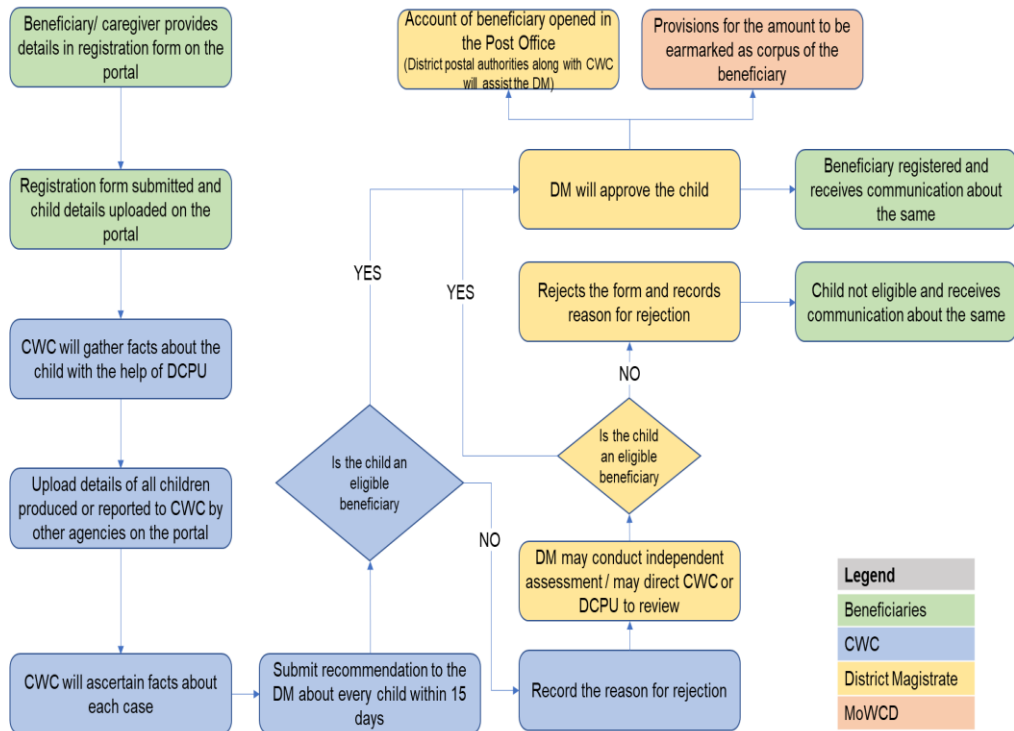
Peran Dewan Keadilan Sosial di tingkat Negara Bagian adalah menjadi pengawas tindakan yang diambil oleh semua distrik untuk perawatan dan perlindungan anak-anak yang menerima dukungan berdasarkan skema hingga anak-anak berumur 23 tahun. Departemen ini harus berkoordinasi dengan departemen kesehatan,

pendidikan, dan departemen lainnya untuk membantu hakim distrik dalam memfasilitasi layanan dan tunjangan bagi anak-anak. Departemen ini juga memiliki kewajiban dalam memantau kemajuan yang dicapai oleh setiap anak dan memfasilitasi transfer antar negara bagian untuk tujuan studi yang lebih tinggi, pelatihan profesional maupun tujuan apapun lainnya demi kepentingan anak-anak.

Di tingkat Distrik, Hakim distrik menjalankan perannya sendiri sebagai wali dari anak-anak yatim piatu. Hakim Distrik akan menjalankan perannya dalam identifikasi, pendaftaran, dan verifikasi. Hakim Distrik akan mengidentifikasi penerima manfaat dengan dibantu oleh Komite Kesejahteraan Anak dan Unit Perlindungan Anaak di tingkat Distrik. Setelah yakin dengan keaslian penerima manfaat, Hakim Distrik akan memverifikasi dan mengonfirmasi rincian anak tersebut di portal PM CARES for Children. Selain itu Hakim Distrik juga berkewajiban untuk melakukan pembukaan rekening dan transfer dana ke rekening anak-anak penerima manfaat (setelah pembukaan rekening dan validasinya berhasil, Hakim Distrik akan mentransfer jumlah korpus yang memenuhi syarat ke rekening penerima. Anak/wali akan diberikan ID login untuk melihat dasbor pribadi di portal untuk melihat hak hak-hak yang didapatkan, layanan yang diberikan, dan nomor kontak penting anggota Komite Kesejahteraan Anak, Unit Perlindungan Anak Tingkat Distrik, dan Hakim Distrik.

Gambar III. 4

Alur Proses Pendaftaran Penerima



Sumber: PIB Delhi. 2022. “PM CARES for Children Scheme Extended up to 28th February, 2022”. <https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1800268>. Diunduh pada 20 Agustus 2023

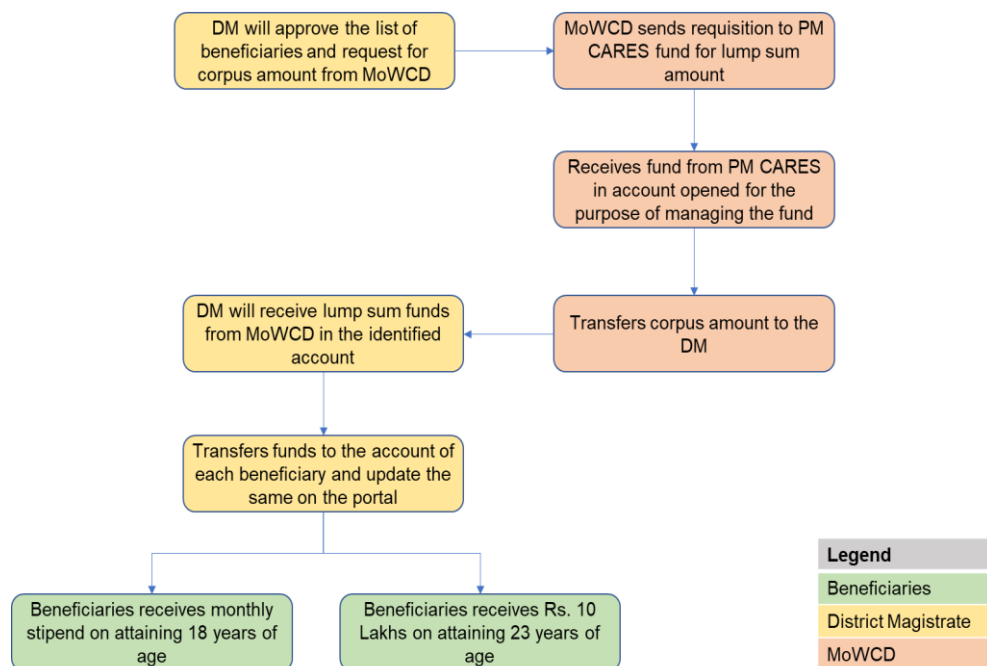
Dari gambar di atas dijelaskan mengenai alur proses pendaftaran calon penerima manfaat yang kemudian akan mengalami seleksi dokumen oleh Komite Kesejahteraan Anak, rekomendasi terhadap Hakim Distrik, persetujuan oleh Hakim Distrik, dan kemudian jika akun telah disetujui maka Hakim Distrik akan melakukan pembukaan rekening atas nama anak dan melaporkan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

Anak-anak calon penerima manfaat memiliki waktu seminggu dalam pendaftaran dan pengunggahan semua data yang diperlukan termasuk surat kematian orang tua yang meninggal karena Pandemi COVID-19, setelah itu waktu yang dibutuhkan oleh Komite Kesejahteraan

Anak adalah 15 hari. Sisanya, Hakim Distrik akan menerima rekomendasi dari Komite dan wajib memastikan pendaftaran anak hingga persetujuan akhir dalam jangka waktu 1 bulan. Satu bulan setelah persetujuan Hakim Distrik, penerima manfaat akan sudah dapat mendapatkan bantuan dan layanan yang tersedia dari skema.

Gambar III. 5

Mekanisme Aliran Dana Bagi Penerima Manfaat



Sumber: *Ibid*

Dari gambar di atas dijelaskan bahwa mekanisme aliran dana bagi penerima manfaat dimulai dari persetujuan hakim distrik terhadap akun penerima dan kemudian memberikan laporan kepada menteri pemberdayaan perempuan dan anak, setelah itu menteri akan mengirimkan permohonan kepada PM CARES Fund mengenai sejumlah uang untuk anak-anak penerima manfaat, setelah menerima dana, menteri akan mentransfernya kepada hakim distrik dan kemudian hakim distrik akan meneruskan transferan dana langsung kepada anak/wali anak.

C.4 Hasil skema PM CARES for Children

Skema yang diluncurkan pada 29 Mei 2021 oleh Perdana Menteri Narendra Modi dengan menunjuk NCPCR sebagai penanggung jawab, telah memperlihatkan hasil yang nyata. Menurut dashboard di situs skema PM CARES for Children, telah terdapat 9.320 pendaftar dari 33 negara bagian dan 613 distrik. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.526 anak dari 31 negara bagian dan 559 distrik telah diidentifikasi dan disetujui untuk memperoleh manfaat dari skema.⁸⁷

Implementasi skema PM CARES for Children yang dilakukan oleh Pemerintah jelas belum mampu menjangkau semua kalangan anak-anak yatim piatu di seluruh India karena tantangan yang dihadapi cukup besar yaitu ketidakmampuan medis dalam mengeluarkan surat kematian corona dikarenakan permintaan yang melonjak yang diperburuk dengan kurangnya sistem pencatatan kematian yang efektif. Hal ini berimplikasi terhadap nasib anak yatim piatu yang hendak mengajukan aplikasi pendaftaran dalam portal skema. Sebab ketidaklengkapan data dapat membuat Hakim Distrik tidak menyetujui aplikasi yang diajukan oleh anak.

D. Analisa Keberhasilan Kebijakan Pemerintah India dalam Melindungi Hak Anak Yatim Piatu Selama Pandemi

Pemerintah India telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin keselamatan anak-anak yatim piatu. Kebijakan yang dibuat oleh Perdana Menteri mampu mengembalikan senyum anak-anak yang kehilangan kedua orang tua. Pemerintah India telah mengambil langkah yang besar untuk merawat anak-anak dengan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak seperti hak untuk pemenuhan kebutuhan dasar, hak pendidikan, hak kesehatan, dan hak-hak lainnya.

⁸⁷ Ministry of Women and Child Development. 2022. "PM CARES for Children". <https://pmcaresforchildren.in/>. Diunduh pada 16 Oktober 2023

Ada hubungan yang erat antara pembangunan negara dengan anak-anak. Mengabaikan anak berarti membatasi pembangunan bangsa dan kegiatan pemajuan bangsa. Lingkungan yang kondusif harus dibangun bagi anak, untuk itu anak-anak harus diberi segala fasilitas yang diperlukan agar kelak menjadi warga negara yang bertanggung jawab.

Perjuangan melawan Pandemi COVID-19 tidak hanya dicapai dengan vaksin, pembatasan jarak maupun penggunaan masker, namun pemerintah juga harus menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat dengan memberikan dukungan yang tepat. Ketika seorang anak kehilangan orang tuanya, maka sama halnya bahwa anak kehilangan seluruh dunianya dan membutuhkan dukungan dan Perdana Menteri Modi dalam masa kepemimpinannya yang kedelapan tahun telah berhasil memberikan dukungan tersebut kepada anak-anak dengan memberikan pertolongan jangka pendek (Baal Swaraj), jangka menengah (SAMVEDNA), dan jangka panjang (PM CARES for Children). Perdana Menteri Modi dinilai masyarakat telah menyelamatkan masa kecil anak-anak yang berarti juga telah menyelamatkan masa depan bangsa.

Namun disisi lain, kebijakan-kebijakan Pemerintah India belum dapat dikatakan sepenuhnya berhasil karena penerima manfaat skema bahkan belum mencapai 50%. Dikatakan bahwa penerima manfaat kebijakan PM CARES for Children sebanyak 4.526, padahal data di Baal Swaraj menunjukkan jumlah 10.386 anak-anak yang kehilangan kedua orang tuanya.⁸⁸ Sementara itu, pengguna layanan konseling melalui SAMVEDNA baru tercatat sebanyak 1009 pengaduan, padahal pada masa Pandemi COVID-19 banyak anak-anak yang menderita secara psikologis.⁸⁹

⁸⁸ Ministry of Women and Child Development. 2022. "PM CARES for Children". <https://pmcaresforchildren.in/>. Diunduh pada 16 Oktober 2023

⁸⁹ PTI. 2021. "Over 1000 Children, Parents Reach Out to Govt Helpline to Tackle COVID Woes". <https://www.livemint.com/news/india/over-1000-children-parents-reach-out-to-govt-helpline-to-tackle-covid-woes-11621334680839.html>. Diunduh pada 4 September 2023

BAB IV

KESIMPULAN

Hasil penelitian yang telah dijabarkan penulis, penulis menyimpulkan bahwa Pandemi COVID-19 telah menyebabkan banyak kematian pada orang dewasa sehingga hal ini berimplikasi pada peningkatan jumlah anak yatim piatu di India dan menyebabkan anak-anak yatim piatu tersebut mengalami banyak masalah terkait pelanggaran HAM selama Pandemi COVID-19. Anak-anak yang kehilangan kedua orang tuanya karena pandemi menjadi entitas paling rentan karena anak-anak ini menghadapi tantangan yang jauh lebih besar terhadap trauma emosional, kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, kurangnya waktu bermain, putus pendidikan dan kehilangan harapan mengenai masa depan. Selain itu, anak-anak yatim piatu di India juga dihadapkan dengan resiko perdagangan manusia, pekerja anak, dan pernikahan anak.

Berdasarkan teori kebijakan publik oleh David Easton, penulis mengerti bahwa sebelum kebijakan publik itu muncul, terdapat partisipasi masyarakat yang mempengaruhinya yaitu berupa tuntutan. India, sebagai salah satu negara yang meratifikasi konvensi hak-hak anak (UNCRC) dituntut menjalankan tugasnya untuk melindungi dan menjamin hak-hak anak di negaranya. Di dorong oleh adanya masukan berupa surat tuntutan dari masyarakat agar pemerintah segera mengeluarkan kebijakan yang efektif untuk membantu anak-anak selama Pandemi COVID-19, akhirnya dengan sistem politik yang ada, Pemerintah India mengeluarkan 3 kebijakan sebagai berikut.

Pertama, untuk melindungi hak anak-anak atas kebebasan perkembangan emosional, Pemerintah mengeluarkan inisiatif SAMVEDNA (*Sensitizing Action on Mental Health Vulnerability through Emotional Development and Necessary Acceptance*). Inisiatif ini diluncurkan pada September 2020 untuk mendampingi anak-anak rentan

di tengah situasi Pandemi COVID-19 dibawah tanggung jawab Komisi Nasional Perlindungan Hak Anak (NCPCR).

Kebijakan kedua adalah peluncuran portal Baal Swaraj. Peluncuran portal ini dibuat mengingat meningkatnya jumlah anak yatim piatu dan permasalahan anak-anak akibat Pandemi COVID-19. Portal ini dibawah tanggung jawab NCPCR, dibuat dengan tujuan untuk pelacakan online dan mekanisme pemantauan real time digital terhadap anak-anak yang membutuhkan pengasuhan dan perlindungan.

Kebijakan ketiga adalah peluncuran skema *PM CARES for Children*. Skema ini diluncurkan pada 29 Mei 2021 dan dijalankan oleh NCPCR dengan dibantu oleh Departemen Keadilan Sosial di Negara Bagian dan Hakim Distrik di tingkat distrik. Tujuan dari skema ini adalah untuk melindungi, memberi dukungan kepada anak-anak yang telah kehilangan kedua orang tua akibat Pandemi COVID-19. Skema ini akan memastikan perawatan dan perlindungan secara menyeluruh dan berkelanjutan serta memungkinkan kesejahteraan anak yatim piatu melalui asuransi kesehatan, memberdayakan anak-anak melalui pendidikan dan membekali anak-anak untuk hidup mandiri dengan dukungan keuangan hingga usia 23 tahun.

Berdasarkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah India, penulis menyimpulkan bahwa kebijakan-kebijakannya belum sepenuhnya berhasil dalam menghilangkan pelanggaran-pelanggaran hak anak yatim piatu di India, namun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan India sudah mampu memberikan peluang untuk masa depan yang lebih baik karena salah satu kebijakan yang terkandung dalam skema adalah pemberian beasiswa pendidikan gratis seumur hidup bagi anak-anak yatim piatu, dengan begitu anak-anak yatim piatu akan memiliki kesempatan bersekolah setinggi-tingginya dan tidak akan menjadi korban pekerja anak maupun pernikahan anak. Sebab dengan pergi bersekolah anak yatim piatu akan mendapatkan wawasan dan keahlian yang diperlukan untuk menghadapi tantangan di masa depan,

memperoleh rutinitas yang stabil, mendapatkan kesempatan untuk bersosialisasi dengan anak-anak lainnya, dan yang tidak kalah penting anak-anak akan memperoleh perlindungan dan pemantauan dari para guru dan juga staf pendidikan.

Dalam penelitian ini, penulis juga menemukan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan, Pemerintah India menghadapi banyak hambatan dan tantangan dimana ternyata di India tingkat adopsi dan jumlah panti asuhan tidak sebanding dengan jumlah anak yatim piatu di India, selain itu tantangan juga datang dari kearifan lokal yang dimiliki masyarakat seperti patriarki, sistem kasta dan juga masalah internal dari Pemerintah India itu sendiri yang berupa keterbatasan sumber daya. Namun, selain adanya tantangan dan hambatan, India juga memiliki peluang dalam perwujudan perlindungan hak-hak anak yatim piatu. Peluang yang dimiliki oleh Pemerintah India yaitu adanya undang-undang dan kebijakan yang memuat perlindungan dan kepentingan anak-anak di India, adanya kerjasama dengan berbagai pihak, antusiasme anak-anak dan masyarakat serta peran masif dari media massa.

Melalui penelitian ini penulis juga dapat menarik kesimpulan bahwa adopsi anak adalah cara terbaik untuk mengatasi masalah tingginya anak yatim piatu di India. Karena dengan meningkatnya jumlah adopsi di India, maka anak-anak yatim piatu akan mendapatkan rumah dan orang tua asuh. Dengan begitu, anak-anak tidak akan hidup di jalanan tanpa pengawasan orang dewasa, karena hidup di jalanan sangat mendekatkan anak-anak menjadi sasaran korban perdagangan manusia dan mengalami berbagai bentuk kekerasan. Selain itu, dengan di adopsi, anak-anak yatim piatu akan mendapatkan hak-hak dasarnya sebagai anak-anak yaitu hak untuk dipenuhi kebutuhan dasarnya, hak untuk bermain, hak untuk berkembang, dan hak-hak lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Bajpai, Asha. 2017. *Child Rights in India: Law, Policy, and Practice*. India: Oxford University Press

Chopra, Geeta. 2015. *Child Rights in India: Challenges and Social Action*. New Delhi: Springer

Handoyo, Eko. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya

Kadji, Yulianto. 2015. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*. Gorontalo: UNG Press

Malian, Sobirin & Muhamad Uhaib. 2021. *Kebijakan Publik dalam Negara Hukum*. Yogyakarta: Kreasi Total Media

Mustari, Nuryanti. 2015. *Pemahaman Kebijakan Publik*. Yogyakarta: LeutikaPrio

Nazir, Mohammad. 2014. *Metode Penelitian*. Bandung: Ghalia Indonesia

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

INTERNET

Ability India. 2020. "SAMVEDNA". <https://abilityindia.org/india-fights-covid-19/samvedna/>. Diunduh pada 17 Agustus 2023

AC Team. 2020. "NCPCR Launches "Bal Swaraj" Portal for Children Affected by COVID-19". <https://affairscloud.com/ncpcr-launches-bal-swaraj-portal-for-children-affected-by-covid-19/>. Diunduh pada 20 Agustus 2023

- Ani. 2021. "NCPCR Devises Online Portal 'Bal Swaraj' for Children Affected by COVID-19". <https://theprint.in/india/ncpcr-devises-online-portal-bal-swaraj-for-children-affected-by-covid-19/668113/>. Diunduh pada 20 Agustus 2023
- BBC News Indonesia. 2017. "Mengapa Tradisi Perkawinan Anak di India Masih bertahan?". <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-40286242>. Diunduh pada 7 Agustus 2023
- BBC. 2020. "India's Covid Crisis Sees Rise in Child Marriage and Trafficking". <https://www.bbc.com/news/world-asia-india-54186709>. Diunduh pada tanggal 30 November 2022
- Bhalla, Nita. 2017. " 'New India' Vision cannot Be Realized Unless Child Sex Crimes are Tackled: President". Diunduh di <https://www.reuters.com/article/us-india-children-sex-crimes-idUSKBN1CL2DM> pada tanggal 26 Juni 2023
- Biswas, Soutik. 2022. "Why India's real COVID Toll May Never be Known". <https://www.bbc.com/news/world-asia-india-60981318>. Diunduh pada 28 Juli 2023
- Chatteraji, Saubharada. 2016. "Child Labour Bill Passed, Teens above 14 Can be Hired for Non-Hazardous Jobs". <https://www.hindustantimes.com/india-news/child-labour-bill-passed-teens-above-14-can-be-hired-for-non-hazardous-jobs/story-7wI5yP5ZS5S4GDfpF1zyMM.html>. Diunduh pada 25 Agustus 2023
- Children Incorporated. 2022. "Help Save Children in India". <https://childrenincorporated.org/help-save-children-in-india/>. Diunduh pada tanggal 31 Maret 2023
- Children Incorporated. 2022. "Help Save Children in India". <https://childrenincorporated.org/help-save-children-in-india/>. Diunduh pada 25 Agustus 2023

Daily Updates. 2023. "Rise in Child Labour". <https://www.drishtias.com/daily-updates/daily-news-editorials/rise-in-child-labour>. Diunduh pada 25 Agustus 2023

Express News Service. 2021. "PM Announces Aid, Free Education for COVID Orphans; Pension for Employees' Next of Skin". <https://indianexpress.com/article/india/centre-to-help-children-left-orphaned-by-covid-with-education-loan-7335686/>. Diunduh pada 20 Agustus 2023

Forum IAS. 2021. "Orphaned Children in India, Explained, Pointwise". <https://blog.forumias.com/orphaned-children-in-india/>. Diunduh pada 5 September 2023

Ghosh, Susmita. 2021. "COVID-19 Made Poor More Vulnerable to Child Trafficking, Say NGOs". <https://www.indiatoday.in/coronavirus-outbreak/story/covid-19-poor-marginalised-vulnerability-child-trafficking-ngos-1812519>. Diunduh pada 3 Agustus 2023

Humanium. 2012. "Realizing Children's Rights in India". <https://www.humanium.org/en/india/>. diunduh pada tanggal 5 Januari 2024

Hussain, Eisha. 2022. "Why India is Struggling with the Burden of Teen Pregnancies". Di unduh <https://behanbox.com/2022/07/31/why-india-is-struggling-with-an-increased-burden-of-teen-pregnancies>. Diunduh pada tanggal 26 Juni 2023

Ilmuk. 2021. "The State of India's Orphaned Children Crisis". <https://www.ilmuk.org/news/the-state-of-india-s-orphaned-children-crisis/>. Diunduh pada 25 Juli 2023

Jain, Nitin. 2021. "COVID Orphans Up for Sale". <https://www.indiatoday.in/india/story/covid-orphans-sale-illegal-adoption-sting-operation-video-1882630-2021-11-30>. Diunduh pada 3 Agustus 2023

- Jatinverma. 2020. "Only 82 Trafficking Survivors Awarded Relief In The Last 8 Years". <https://www.jatinverma.org/only-82-trafficking-survivors-awarded-relief-in-the-last-8-years>. Diunduh pada 12 Juli 2023
- Keenan, David. 2023. "The Situation of Orphans in India". <https://borgenproject.org/orphans-in-india/#:~:text=India%20has%20the%20second%20largest,portion%20of%20the%20youth%20population>.. Diunduh pada 29 Agustus 2023
- Krishnan, Murali. 2021. "Number of Out of School Children in India Increase During the Pandemic". <https://www.dw.com/id/jumlah-anak-putus-sekolah-di-india-meningkat-selama-pandemi/a-60270808>. Diunduh pada 12 Agustus 2020
- K, Sankunni . 2021. "Estimated 18 Million Children Live on Streets in India, Home to One of the Largest Child Populations on Earth". <https://www.timesnownews.com/india/article/estimated-18-million-children-live-on-streets-in-india-home-to-one-of-the-largest-child-populations-on-earth/744047>. Diunduh pada tanggal 5 Januari 2024
- Kumar, Sanjay. 2021. " Children Orphaned by COVID-19 Facing Uncertain Future in India". <https://www.arabnews.com/node/1876736/world>. Diunduh pada 5 Januari 2024
- Lyon, Eliza. 2019. "India's 29 Million Unwanted Children". <https://westernindependent.com.au/2019/08/15/indias-29-million-unwanted-children/>. Diunduh pada 28 Juli 2023
- Makhijani, Neelam. 2021. "Saving the Lost Children of COVID-19". <https://www.forbesinda.com/blog/coronavirus/saving-the-lost-children-of-covid-19/>. Diunduh pada tanggal 5 April 2023
- Marla. 2013. "India's Orphaned Dalits". https://www.families-for-orphans.org/2013/07/indias-orphaned-dalits_13.html. Diunduh pada tanggal 5 Januari 2024
- Ministry of Women and Child Development Government of India. 2021. "Children impacted by COVID-19 Pandemic being provided Tele Counselling through SAMVEDNA". Diunduh di

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1719426> pada 22 Mei 2023

Ministry of Women and Child Development Government of India. 2021. "PM CARES For Children". Diunduh di <https://pmcaresforchildren.in/> pada 22 Mei 2023

Ministry of Women and Child Development Government of India. 2022. "NCPCR launches "CiSS application" under Baal Swaraj portal to help rehabilitation of children in street situation". Diunduh di <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1832210> pada 22 Mei 2023

Mukherjee, Debarati. 2009. "Widespread Violation of Children's Rights in India". <https://www.dw.com/en/widespread-violation-of-childrens-rights-in-india/a-5211880>. Diunduh pada tanggal 30 November 2022

N, Alisa. 2022. "Volunteer with the Street Children of India". <https://www.goeco.org/article/street-children-of-india/>. Diunduh pada 1 September 2023

Nazir, Tashafi. 2022. "World Day Against Trafficking: 8000 Children Trafficked in Last 3 Years in India, What is the Current Situation?". <https://thelogicalindian.com/humanrights/world-day-against-trafficking-36768>. Diunduh pada tanggal 4 April 2023

NCPCR. 2022. "National Commission for Protection of Child Rights". <https://ncpcr.gov.in/functions-and-powers>. Diunduh pada 15 Agustus 2023

News and Press Release. 2021. "Save the Children Fears Trafficking and Abuse Amid Social Media Pleas to Adopt India's COVID Orphans". <https://reliefweb.int/report/india/save-children-fears-trafficking-and-abuse-amid-social-media-pleas-adopt-india-s-covid>. Diunduh pada tanggal 5 Januari 2024

Oonk, Gerard. 2016. "New Indian Child Labour Bill Allows Many Children to Work". <https://stopchildlabour.org/new-indian-child-labour-bill-allows-many-children-to-work/>. Diunduh pada 25 Agustus 2023.

Our Bureau. 2022. "PM Launches 'PM CARES for Children Scheme' for Kids who Lost Parents to Covid". <https://www.thehindubusinessline.com/companies/pm-launches-pm-cares-for-children-scheme-for-kids-who-lost-parents-to-covid/article65476192.ece>. Diunduh pada 16 Oktober 2023

PIB Delhi. 2020. "Welfare Schemes for Orphan Children". <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1602395>. Diunduh pada 17 Agustus 2023

PIB Delhi. 2021. "Children Impacted by COVID-19 Pandemic being Provided Tele Counselling through SAMVEDNA". <https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1719426>. Diunduh pada 19 Agustus 2023

PIB Delhi. 2021. "NCPCR Asks States/UTS to Upload Data of Children Who Have Lost Both or Either of The Parent to COVID-19 on Oline Tracking Portal 'Bal Swaraj (Bal Swaraj (COVID-Care))". <https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1722677>. Diunduh pada 20 Agustus 2023

PIB Delhi. 2021. "PM CARES for Children Scheme". <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1741528>. Diunduh pada 20 Agustus 2023.

PIB Delhi. 2022. "Lancet Article Sophisticated Trickery Intended to Create Panic Among Citizens, Divorced from Truth and Ground Reality". <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1802393>. Diunduh pada 23 Juli 2023

PIB Delhi. 2022. "Lancet Article Sophisticated Trickery Intended to Create Panic Among Citizens, Divorced from Truth and Ground Reality: Ministry of Women and Child Development". <https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1802393>. Diunduh pada 4 September 2023

PIB Delhi. 2022. "Lancet Article Sophisticated Trickery Intended to Create Panic Among Citizens, Divorced from Truth and Ground Reality: Ministry of Women and Child Development".

<https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1802393>. Diunduh pada 4 September 2023

PIB Delhi. 2022. “PM CARES for Children Scheme Extended up to 28th February, 2022”. <https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1800268>. Diunduh pada 20 Agustus 2023

Prabhudesai, Vidyadhar. 2022. “Why India Struggles with Low Adoption Rates, Caste, Class to Genetics”. <https://theprint.in/india/why-india-struggles-with-low-adoption-rates-caste-class-to-genetics>. Diunduh pada tanggal 5 Januari 2024

Prabhu, Pranav. 2021. “Illiteracy in India”. <https://storymaps.arcgis.com/stories/e6304125e0394b758b2b10d906155b85>. Diunduh pada 30 Agustus 2023

Prameswaran, Gayatri dan Felix Gaedtke. 2015. “Millions of Children Hard at Work in India”. <https://aljazeera.com/features/2015/6/12/millions-of-children-hard-at-work-in-india>. Diunduh pada tanggal 12 April 2023

PTI. 2021. “Over 1000 Children, Parents Reach Out to Govt Helpline to Tackle COVID Woes”. <https://www.livemint.com/news/india/over-1000-children-parents-reach-out-to-govt-helpline-to-tackle-covid-woes-11621334680839.html>. Diunduh pada 4 September 2023

Raj, Priti. 2022. “NCPCR”. <https://www.clearias.com/ncpcr/#:~:text=The%20commission's%20role%20includes%20making,eighteen%20is%20considered%20a%20child>. Diunduh pada 15 Agustus 2023

Rathi, Bhagyashree. 2022. “Child Care Institutions and Orphaned Children During COVID-19 Pandemic”. <https://nhrc.nic.in/sites/default/files/Group%202%20April.pdf>. Diunduh pada tanggal 22 Mei 2023

Sahariah, Sutirtha. 2015. “Child Trafficking in India”. <https://www.theguardian.com/global-development/2015/apr/28/child-trafficking-india-domestic-labour-chhattisgarh>. Diunduh pada 25 Agustus 2023

- Shankar, Siva. 2021. "Breaking Patriarchy At Its Root". <https://timesofindia.indiatimes.com/readersblog/thoughtsthatstrikesme/breaking-patriarchy-at-its-root-31134/>. Diunduh pada tanggal 5 Januari 2024
- Sharma, Igorav. 2021. "What is Right to Education Act (RTE Act)?". <https://timesofindia.indiatimes.com/readersblog/igoravsharma/what-is-right-to-education-act-rte-act-32034/>. Diunduh pada 15 Agustus 2023
- Shetty, Rashmi. 2021. "Child Protection Laws in India". <https://www.actionaidinindia.org/child-protection-laws-in-india/>. Diunduh pada tanggal 5 Januari 2024
- Singh, Paalika. 2022. "Street Children: the Neglected Pathology". <https://www.orfonline.org/expert-speak/street-children-the-neglected-pathology/>. Diunduh pada 2 September 2023
- Sivakumar, B. 2022. "Pandemic, Lockdown Woes Led to Rise in Child Marriages in India". <https://thefederal.com/news/pandemic-lockdown-woes-led-to-rise-in-child-marriages-in-india/>. Diunduh pada 7 Agustus 2023
- Smile Foundation.. 2018. "Child Rights in India". <https://www.smilefoundationindia.org/child-rights/>. Diunduh pada 13 September 2023
- Statista. 2022. "Poverty and Inequality in India". <https://www.statista.com/statistics/1269637/india-population-living-in-poverty-by-age-group/>. Diunduh pada 22 Agustus 2023
- Tembhekar, Chittaranjan. 2014. "More than 53% Children in India Have Faced Sexual Abuse". <https://timesofindia.indiatimes.com/india/more-than-53-children-in-india-have-faced-sexual-abuse/articleshow/40072327.cms>. Diunduh pada tanggal 26 Juni 2023
- Thangaperumal, dkk. 2022. "Fewer Meals, Doing Paid Work: What A Study of Children who Lost Parents to COVID Shows". <https://scroll.in/article/1034953/fewer-meals-doing-paid-work-what-a>

study-of-children-who-lost-parents-to-covid-shows. Diunduh pada 14 Agustus 2023.

The New York Times. 2023. “Tracking Coronavirus in India: Latest Map and Case Count”. <https://www.nytimes.com/interactive/2021/world/india-covid-cases.html>. Diunduh pada 17 Juli 2023

TheLawmatics. 2021. “Orphaned Child Rights in India”. <https://thelawmatics.in/orphan-child-rights-in-india/>. Diunduh pada 17 Agustus 2023

UNICEF USA. 2023. “UNICEF LION FUND: Protecting India’s Most Vulnerable Children”. <https://www.unicefusa.org/what-unicef-does/childrens-protection/unicef-lion-fund>. Diunduh pada 4 Agustus 2023

UNICEF. 2018. “25 Million Child Marriages Prevented in Last Decade Due to New UNICEF Estimates”. <https://www.unicef.org/india/press-releases/25-million-child-marriages-prevented-last-decade-due-accelerated-progress-according>. Diunduh pada 7 Agustus 2023

UNICEF. 2019. “Ending Child Marriage and Adolescent Empowerment”. <https://www.unicef.org/india/what-we-do/end-child-marriage>. Diunduh pada 25 Agustus 2023

UNICEF. 2020. “Education”. <https://www.unicef.org/india/what-we-do/education>. Diunduh pada 30 Agustus 2023

UNICEF. 2021. “Child Protection”. <https://www.unicef.org/india/what-we-do/child-protection>. Diunduh pada tanggal 29 Maret 2023

UNICEF. 2021. “Child Protection”. <https://www.unicef.org/india/what-we-do/childprotection#:~:text=Violence%20against%20children%20is%20widespread,violence%2C%20child%20labour%20and%20bullying>. Diunduh pada 22 Agustus 2023

UNICEF. 2022. “UNICEF Data”. <https://data.unicef.org/how-many/how-many-children-under-18-are-there-in-india/>. Diunduh pada tanggal 22 November 2022

UNICEF. 2022. “UNICEF Data”. <https://data.unicef.org/how-many/how-many-children-under-18-are-there-in-india/>. Diunduh pada tanggal 22 November 2022

United Nations. 2020. “Human Rights”. <https://www.un.org/en/global-issues/humanrights#:~:text=Hman%20rights%20are%20rights%20inherent,and%20education%2C%20and%%20many%20more>. Diunduh pada tanggal 18 April 2023

Vikaspedia. 2020. “Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015”. <https://vikaspedia.in/education/child-rights/juvenile-justice-care-and-protection-of-children-act-2015>. Diunduh pada 17 Agustus 2023

Vikaspedia. 2023. “PM CARES for Children’ Scheme”. <https://vikaspedia.in/schemesall/schemes-for-child/pmcares-for-children-scheme>. Diunduh pada 20 Agustus 2023

WHO. 2023. “The True Death Toll of COVID-19 Estimating Global Excess Mortality”. <https://www.who.int/data/stories/the-true-death-toll-of-covid-19-estimating-global-excess-mortality>. Diunduh pada 31 Juli 2023

